

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

##### **1.1.1. Konteks**

Berkisah tentang modernitas selalu meninggalkan sensasi tersendiri karena berbagai nuansa aneka warna yang menyeruak. Mitos modernitas seringkali digambarkan sebagai hingar-bingar pengalaman hidup tentang ruang dan waktu yang carut-marut dan keras tanpa ampun (Budiman, 1997, hal. 2). Namun demikian selalu saja masih terdapat harapan atas kemuliaan, mimpi, dan penaklukan. Modernitas benar-benar merupakan sebuah pemahaman tentang tahapan sejarah manusia yang menjanjikan setumpuk gelombang persoalan yang mencemaskan sekaligus menyimpan luapan ekspresi estetis yang memabukkan, sebagaimana pernyataan Berman (Budiman, 1997, hal.1) :

"Menjadi modern berarti mendapatkan diri kita dalam suatu keadaan yang menjanjikan petualangan, kekuasaan, keriang, pertumbuhan, transformasi diri dan dunia --- dan pada saat sama, mengancam akan memusnahkan segala yang kita punya, semua yang kita tahu, segalanya dari kita".

Menjadi modern juga berarti bersiap untuk tidak bisa memaknai dan mengarungi hidup dengan penuh ketenangan, karena pola lintasan hidup yang dicetak serba linear dan seragam, tapi menantang. Seluruh aktifitas hidup harus dipacu bersama waktu. tidak ada yang sempat mengkristal dan beku, terburu terlindas torehan tinta sejarah, sebagaimana digambarkan Berman (Budiman, 1997, hal.1): "...ia melemparkan kita dalam prahara disintegrasi dan pembaharuan terus menerus yang kerap kali menyakitkan, pergumulan dan pertentangan, ambiguitas sikap dan kepedihan yang dalam". Segenap peninggalan harus terus diluruhkan dan

musti direlakan sebagai warisan masa silam yang tak layak ditengok ulang. Tidak ada pesanggrahan untuk tetirah dari petualangan sebagaimana kisah perjalanan Odysseus ke kampung halaman (Sindhunata, 1983)<sup>1</sup>.

Akselerasi terus menerus, tanpa ada sesuatu yang sempat mengkrystal adalah bentuk dominasi karakteristik modernitas. Semua senantiasa cair. Hampir seluruh batas-batas manusiawi (ras, tradisi, ideologi, kebangsaan, agama bahkan sejarah) diwarnai oleh dinamika modernitas hingga tiada pernah berhenti bergetar dan tak pernah sempat mengeras. Mitos modernitas yang populer menurut Hikmat Budiman (1997, hal. 2) adalah "penghancuran kreatif" :

"Dinamo kemajuan selalu menampilkan dirinya lakana mesin berwajah ganda, pembangun sekaligus penghancur, merampas sembari berjanji memberikan segalanya. Setiap produk yang dihasilkan pada saat itu pula harus siap menjadi usang. Dengan kata lain, modernitas adalah waktu yang menaklukkan ruang dan menjadi arena lapang bagi keruntuhan. Dan seperti kata Marx, semua yang padat menguap ke udara".

Fenomena modernisasi yang mendorong munculnya ambivalensi dalam peradaban termuat begitu rupa dalam sejarah peradaban manusia. Keberadaan ilmu dan teknologi semakin memperbesar peluang manusia untuk merealisasikan harapannya melalui pengerahan seluruh potensi dirinya, di mana hal ini sekaligus merupakan upaya optimal pemuasan kebutuhan materialnya serta pembebasan manusia dari problem-problem kelangkaan ekonomis. Di sisi lain, dramatisasi perubahan pola hubungan resiprokal antara manusia dan alam yang sebelumnya

---

<sup>1</sup> Odysseus adalah legenda pahlawan Yunani dalam perang Troya, ia dipandang memperoleh pencerahan karena segala kepandaian, akal dan kelicikannya yang bisa mempecundangi para dewa dan menaklukkan keganasan alam hingga ia selamat dan tiba kembali di tanah airnya setelah usainya perang Troya. Horkheimer menganalogkan Odysseus dengan manusia modern yang menderita ketegangan dialektis antara usaha manusia rasional dan mitos dalam dirinya. Bagi Horkheimer, sejarah kepandaian atau "pengertian rasional" Odysseus demi penyelamatan dirinya adalah riwayat adaptasinya kepada alam, riwayat kemenangan raksasa atau dewa yang irrasional, dan riwayat pengingkaran dirinya. Lihat Sindhunata, 1983, hal. 140-142.

berlaku akibat gejala tersebut, dimana manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* --- manusia memanfaatkan alam --- berbalik menjadi memanipulasi dan mengeksploitasi alam. Warisan Pencerahan akhirnya telah menghibahkan mitosnya sendiri ; bahwa manusia adalah pembuat sejarah --- tapi bukan dalam bentuk yang benar-benar diinginkannya --- lantas menjadi tuhan dunia. Peristiwa ini sekaligus mengafirmasi secara ekstrim kebebasan manusia di hadapan alam yang diilustrasikan "mengancam" (Setiabudi, 1999, hal.2).

Ketergantungan manusia pada perangkat-perangkat instrumental dan ketundukan pada sains modern sebagai instrumen utama nafsu penguasaannya terhadap alam semakin menjadi-jadi. Pemampatan pencerahan pemikiran dalam rasionalitas instrumental dan seluruh aspek kehidupan dikendalikan secara sistematis melalui ketepatan analisis digital yang oleh Erich Fromm dianalogikan sebagai masyarakat yang telah dimesinkan secara total (Fromm, 1996, hal. 1).

### 1.1.2. Modernitas dan Ilmu Pengetahuan Sosial

Pergumulan sejarah ilmu pengetahuan dalam tradisi ergologi Cartesian menjadi kukuh dengan prinsip : *je pens donc je suis, cogito ergo sum*; saya berfikir maka saya ada. Prinsip Descartes yang terus bertahan dengan dikotomi pemikiran khas abad Pencerahan ini bisa dilihat ketika peneliti menjadi subyek berfikir (*res cogitans*) yang menentukan persoalan obyek pikir yang berada di luar dirinya (*res extensa*). Subyek-obyek dibedakan secara oposisi biner. Pemikiran subyek menentukan sejumlah persoalan tentang obyek, serta sebaliknya, tidak ada persoalan jika tidak terdapat dalam pemikiran subyek. Rasio subyek disebut *logosentrism*, pusat dari segalanya. Bentuk kecongkakan intelektual manusia modern tersebut seakan bertujuan ingin mengukuhkan kepongahan subyek, *pour nous rendre comme*

*maitres et possesseurs de la nature* (agar kita bisa menjadi tuan sekaligus pemilik alam semesta). Dengan demikian, institusionalisasi pengetahuan pada galibnya semakin mengokohkan menara gading ilmu pengetahuan terhadap lanskap sosial-historisnya, membangkitkan libido penumpasan keberagaman pengetahuan manusia (Setiabudi, 1999, hal.3)

Konotasi subyek pikir selanjutnya mengarah pada sekumpulan orang yang "bersekolah" yang mampu berfikir ilmiah dan siap patuh pada segala perintah. Ini merupakan awal lahirnya tradisi ilmiah yang telah melahirkan dikotomi tegas antara yang "ilmiah" dan "tidak ilmiah". Institusi akademik kemudian mereproduksi robot-robot pelajar yang tidak berani kurang ajar, para terdidik yang tidak berani menghardik. Target pendidikan untuk memuliakan ilmu dan meninggikan pemahaman manusia tentang diri dan alam berbalik mendoktrinkan keangkuhan dan kepicikan (Setiabudi, 1999, hal. 3). Ilmu pengetahuan modern memang telah gagal mengajarkan sikap *tafakur*, sebab pemahaman ilmiah yang menjadi doktrin adalah penguasaan. Descartes telah mengusulkan kepada manusia untuk menjadi tuan pemilik alam semesta, sementara tradisi Pencerahan mewariskan pendidikan yang mengajari kita tak ubahnya seperti seorang ideolog, bahwa dunia musti ditundukkan dalam ketepatan analisis dan angka-angka. Ambisi ini terus melingkar di benak, dan pada akhirnya meluap menghadirkan relasi-relasi dominasi antar manusia.

Disaat berbagai pemikiran-pemikiran alternatif semakin berkembang --- semacam postmodernisme --- telah menciptakan kelatahan baru dengan memvonis perubahan tersebut sebagai destruktif, bahkan subversif. Reaksi terhadap tawaran sederhana ini hanya dalam dua bentuk; mencurigainya dengan serta merta, atau jika tidak, penduplikasian dan massifikasi pengetahuan khas budaya modernitas akan

menggunakan pisau-pisau positivistic untuk merobeknya agar terbentuk pemahaman yang serba definitif. Yang kemudian tercipta adalah "struktur" wacana postmodernisme, yang menurut (Setiabudi, 1999, hal. 4) dikatakan sebagai *postmo* yang telah disistematisasikan dan siap dihidangkan secara "ilmiah". Sungguh merupakan sebuah kerja intelektual yang harus berakhir tragis

### 1.1.3. Konsep Birokrasi dalam Konteks

Dalam konteks modernitas, wacana birokrasi sebagai suatu instrumen sosial yang pada saat kemunculannya pertama kali lebih banyak didiskusikan dalam konotasi politik, dalam perkembangannya telah menjamah baik ranah-ranah pemerintahan, administratif maupun sebagai gejala sosial yang pemaknaannya terus berkembang termasuk mulai maraknya didiskusikan pada lingkup dunia usaha (Gordon, 1991, hal. 487). Hal ini tentunya sejalan dengan kebutuhan iklim modernitas yang membutuhkan suatu alat untuk merefleksikan, atau "memaksakan", motivasi dan *spirit*-nya ke dalam dunia praksis sedemikian hingga kompleksitas sesuatu kumpulan, atau organisasi, bahkan dunia publik, dapat berjalan linear dengan *spirit* modernitas itu sendiri dan disimplifikasikan di dalam sel-sel struktur yang disebut "birokrasi". Pergumulan pemikiran tentang birokrasi baik menyangkut "*term*" birokrasi itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkannya, bahkan aplikasi konsep birokrasi dalam dunia praksis, telah dilakukan oleh banyak ahli dalam berbagai studi, dan mengambil bentuk *spirit* dan ideologinya sendiri-sendiri, yang hingga saat ini, tidak mendeviasikannya dari lintasan awalnya, bahkan semakin memperkuat ideologi modernitas sebagai landasan epistemologisnya, *aus*, semakin memperkuat posisi eksistensinya.

Sejak satu tahun kematian Weber (1920), kritik keras terhadap birokrasi sudah terlontar lewat Kritik Sosial Veblen (1921) yang berpendapat bahwa birokrasi membuat para anggota organisasi bersandar pada aturan dan hukum mapan serta mengimplementasikannya dalam suatu penampilan yang bersifat mekanis dan tidak imajinatif. Hasil sosialisasi prinsip tersebut dalam organisasi, memaksa individu untuk mengembangkan wawasan searah (hanya berorientasi pada aturan dan hukum yang telah ada) yang pada akhirnya akan membatasi kecakapannya untuk menanggapi situasi perubahan dengan cara-cara baru. Kondisi ini menyebabkan keberadaan birokrasi tidak dapat lagi dikatakan fleksibel dalam menanggapi kondisi lingkungan yang berubah pesat.

Senada dengan Veblen, kritik kedua oleh Parkinson melalui *Parkinson Law* (1962) memandang bahwa birokrasi sebagai mekanisme organisasi untuk mencapai efisiensi harus ditolak. Dikemukakannya bahwa tugas-tugas birokrasi sebagai solusi persoalan organisasi telah terlalu meluas sehingga menutupi waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya. Selain itu, jumlah pejabat ternyata tidak selalu berhubungan dengan banyaknya pekerjaan. Birokrasi, menurutnya cenderung meluas bukan karena beban kerja meningkat, namun karena para penguasa ingin mendapatkan tambahan bawahan dalam rangka memperbanyak jumlah subordinan di bawah hierarki mereka.

Kritik berikutnya berhubungan dengan kecenderungan empirik birokrasi yang mengarah pada pemusatan kekuasaan. Kritik yang dilontarkan oleh Michaels (1966, hal. 365) menyatakan bahwa siapa saja yang membicarakan organisasi dan birokrasi berarti membicarakan pemusatan kekuasaan. Kecenderungan tersebut mengarahkan birokrasi pada suatu sentralisasi kekuasaan di tangan sebagian kecil individu dalam

organisasi yang menggunakan kantornya untuk meningkatkan keuntungan dan mencapai kepentingan mereka sendiri.

Cara yang digunakan birokrasi dalam membatasi intelegensi dengan memisahkan hal yang bersifat formal dengan informal serta dalam menanggapi krisis, menurut Broad (1987) dan Heckscher (1994) semakin memperumit masalah dan merupakan keterbatasan inheren birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perkembangannya kemudian mulai dirintis perumusan *ideal-type* baru yang dikenal dengan pasca-birokrasi (*post-bureaucracy*) atau model interaktif ( Heckscher & Donello, 1994).

#### 1.1.4. *Management Control* dalam Konsep Birokrasi

*Management control* per definisi dinyatakan sebagai seperangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan sehingga memudahkan proses informasi dan membantu manajer mengkoordinasi bagian-bagian organisasi menuju pencapaian tujuan organisasi berkelanjutan (Maciariello & Kirby, 1994) maupun sebagai proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk melaksanakan strategi menuju pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Anthony & Govindarajan, 1995 : hal 8).

*Management control*, sebagai seperangkat teknik-teknik bertujuan, dalam pemaknaannya, dapat dianggap sebagai salah satu wakil yang paling representatif dari implementasi konsep birokrasi, sekaligus pengaman yang memastikan suatu tipe tertentu dari birokrasi tetap berfungsi. Hal ini terjadi karena suatu sebab mendasar, yaitu konsep birokrasi yang sesungguhnya adalah konsep yang abstrak, tetapi dalam perluasan pemaknaannya, ia mengambil posisi positif secara ideologis, terutama dalam aspek penerapan konsep birokrasi dalam organisasi. *Management control*

mengambil porsi yang strategis dalam titik ini, yaitu memastikan seperangkat tujuan dari eksistensi birokrasi dalam posisi positifnya dapat tercapai.

Birokrasi menunjuk pada "kebiroan" atau suatu kualitas yang mendiferensiasi antara "biro" dengan jenis-jenis organisasi yang lain. Pengertian ini berkonotasi dengan sifat-sifat statik dari organisasi (Downs, 1967: 24 - 31). Ia dapat pula diartikan dengan menunjuk pada metode khusus untuk pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi (Downs, 1967: 24 - 31). *Management control* dengan demikian dapat dipandang sekaligus berfungsi dalam dua hal:

1. Menjaga sifat-sifat statik atau kelanggengan organisasi.
2. Sebagai alat yang memastikan terdistribusinya alokasi sumber daya dalam organisasi sesuai dengan tuntutan birokrasi.

Pada awalnya, seiring dengan pemaknaan terhadap birokrasi yang berkonotasi statis dan monolitik, para ahli manajemen organisasi mendesain sistem kontrol sedemikian rupa, yang dilakukan tidak lain untuk tetap melindungi kepentingan *stockholders* maupun manajemen organisasi sendiri, tetapi bukan untuk masyarakat pekerja sebagai anggota organisasi mayoritas. Fenomena tersebut mengantarkan pada justifikasi buruk atas keberadaan sebuah *management control* sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi dan berjalannya birokrasi organisasi.

#### **1.1.5. Perkembangan Fenomena *Management Control* dan Birokrasi**

Pergeseran Gelombang Kedua (*Second Wave : Industrialization*) yang sarat dengan nafas persaingan dan berbagai bentuk karakteristik serta jargon populer --- *hierarchy, matrix, business unit, centralized, profit maximization* --- menuju gelombang keempat (*Fourth Wave : Biopolitics*) yang berorientasi --- sesungguhnya tidak terlalu jauh berbeda dengan gelombang ketiga (*Third Wave : Postindustrial*),

tetapi lebih tampil manusiawi -- pada nilai dan keadilan --- *team value, creation value, democratic, participatory, community*, (Maynard & Mehrtens, 1993) --- memberikan dampak signifikan khususnya dalam konteks perkembangan *managerial*.

Berbagai upaya yang lebih *advance* dilakukan oleh para ahli manajemen dan organisasi, antara lain dengan menawarkan diskursus berupa paradigma-paradigma baru dalam *management control* maupun konsep birokrasi yang berakar pada teori *human relations* (Barnard, 1938; Follett in Graham, 1995; Maslow, 1943; Mc Gregor, 1957; Block, 1993 dalam *Employee Discipline and Post-Bureaucratic Public Organization : A Challenge in the Change Process* ( Leavitt, William M ; Johnson, Gail, 1998 : 73) dengan harapan dapat dijadikan sebagai dasar filosofis terciptanya *management control* sedemikian rupa sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran organisasi tanpa mengorbankan anggota organisasi dan tanpa pengeksploitasian yang berlebihan terhadap sumber daya organisasi.

## 1.2. ASUMSI

Secara umum, pokok permasalahan yang ingin dijawab timbul dari kerangka fundamen asumsi-asumsi yang tersusun sebelumnya pada uraian tentang latar belakang penulisan. Asumsi-sumsi tersebut sangat penting sebagai basis pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian. Namun demikian, penjelasan deskriptif argumentatif yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan tetap akan didasari oleh argumentasi logis. Asumsi pada tesis ini secara *a priori* mendasarkan pada Teory Kritik yang menganggap bahwa : *Bureaucracy concepts* adalah tidak

bebas nilai sehingga secara implisit mengandung karakter-karakter subyektif dan ketidaknetralan yang inheren.

### 1.3. POKOK PERMASALAHAN

Studi empiris tentang birokrasi dan pasca-birokrasi dalam konteks organisasional mulai banyak dilakukan. Beberapa perintis antara lain : Burns dan Salkner, *Management Innovation* (1961) yang menawarkan *organic form* bagi organisasi; Peters and Waterman, *Peters and Waterman's In Search of Excellence* (1982) tentang kristalisasi *organic form* ke dalam sebuah model; Heckscher, *Defining the Post-bureaucratic Type* (1994) menganalisis perkembangan organisasi, keterbatasan birokrasi dan mencoba merumuskan model post-birokrasi dalam organisasi : Donellon dan Scully, *Will the Post-Bureaucratic Organization be a Post-meritocratic Organization?* (1994) mengkaji secara mendalam *merit system* yang merupakan salah satu *traditional logic of bureaucracy* ; Nohria dan Berkley, *Bureaucracy, Technology and the Implosion of Control* (1994) membahas inefisiensi birokrasi, pengaruh perkembangan teknologi dan struktur organisasi pada *virtual organization* ; Gordon, *Bureaucracy, Can We Do Better? We Can Do Worse* (1994) mengkaji tentang kepemimpinan, partisipasi, pengendalian dan makna *community* dalam *interactive post-bureaucracy model* yang ditawarkan Hekscher dan masih banyak lagi studi dan kajian lainnya baik secara empiris maupun teoritis.

Banyaknya kajian tentang birokrasi dan post-birokrasi dalam organisasi dengan menggunakan elemen *management control* sebagai dasar analisis mendorong munculnya *inquiry* untuk melakukan kajian serupa dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif Teori Kritik.

Berangkat dari kerangka asumsi yang tersusun di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang ingin dijawab, yaitu :

1. Bagaimanakah *management control* dibawah paradigma Tradisional, Adaptif dan Cybernetic dalam Perspektif Teori Kritik?
2. Bagaimanakah figur asumsi-asumsi normatif yang menyusun *bureaucracy concept* dalam perspektif Teori Kritik? ?
3. Apakah perkembangan *bureaucracy concepts* mempengaruhi perkembangan *management control* dalam organisasi?

#### 1.4. PEMBATAAN PERMASALAHAN

Pembahasan normatif-teoritis membutuhkan kajian keilmuan yang kompleks dan komprehensif yang mampu mengakomodasi berbagai spektrum yang berpengaruh secara luas dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Untuk lebih fokus, pembahasan dalam penelitian ini dibatasi sampai pada beberapa aspek berikut :

1. Permasalahan asumsi normatif dibatasi sampai pada epistemologi ideologi-ideologi, dan tidak sampai membahas asumsi-asumsi ontologis maupun bentuk-bentuk aksiologi dalam dunia praktis.
2. Pembahasan tidak membahas seluruh versi fase-fase perkembangan pemikiran tentang *bureaucracy concepts* maupun paradigma *management control* yang pernah ada, tetapi hanya menguraikan secara deskriptif-argumentatif (melalui interpretasi berdasarkan basis Teori Kritik) pemikiran-pemikiran yang berpengaruh.



3. Pembahasan tidak diarahkan sebagai dasar penilaian guna menguji yang terbaik dari berbagai bentuk *bureaucracy concept* maupun *management control paradigm*.
4. Birokrasi pada konteks analisis dan pembahasan dalam tesis ini adalah "term" yang terdapat dalam organisasi ekonomi khususnya manajerial.

### 1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui figur asumsi-asumsi normatif yang menyusun *bureaucracy concept* dalam perspektif Teori Kritik.
2. Untuk mengetahui perkembangan *bureaucracy concept* dalam perspektif Kritik
3. Untuk mengetahui model paradigma Tradisional, Konvensional dan Cybernetic dari *management control* dalam Perspektif Kritik
4. Untuk mengetahui apakah perkembangan *bureaucracy concepts* mempengaruhi perkembangan bentuk *management control* dalam organisasi?

### 1.6. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang ingin diperoleh antara lain :

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan berpikir serta memperdalam pemahaman terhadap diskursus dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya manajemen, organisasi dan birokrasi.
2. Bagi pihak lain yang berkepentingan, dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding untuk bahan kajian lebih lanjut.

## 1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan tesis ini dirancang dengan urutan berikut ;

### BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, aumsi-asumsi yang mendasari pembahasan, pokok permasalahan dan pembatasannya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

### BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Menguraikan tentang konsep ideologi, perspektif kritik, *management control* serta birokrasi.

### BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL

Berisi kerangka pemikiran yang menggambarkan logika berpikir yang akan digunakan sebagai penuntun dalam melakukan kajian untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan dalam tesis ini.

### BAB IV : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional indikator-indikator yang digunakan serta bagaimana analisa dan pembahasan dilakukan.

### BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan analisis terhadap masing-masing paradigma dengan menggunakan indikator pembeda sebagaimana dijelaskan dalam metodologi sehingga dapat mengetahui perbedaan *management control* pada masing - masing paradigma. Pembahasan juga dilakukan terhadap perkembangan *bureaucracy concept* dengan menggunakan karakteristik birokrasi dan intepretasi terhadap studi

dan penelitian - penelitian terdahulu . Hasil analisa dan pembahasan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penelitian akan ditutup dengan menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1. TINJAUAN SINGKAT BIROKRASI

##### 2.1.1. Sejarah Singkat Birokrasi

Dalam perbendaharaan bahasa pada abad ke-18, biro (*bureau*) yang berarti meja tulis, selalu diartikan sebagai suatu tempat di mana para pejabat bekerja. Tambahan sisipan yang diturunkan dari kata Yunani "*cratie*" berarti aturan (*rule*), menghasilkan suatu istilah yang dapat menembus ke dalam budaya-budaya lain di dunia. *Bureaucratie* dengan cepat berkembang menjadi *bureaokratie* dalam bahasa Jerman (kemudian menjadi *buokratie*), *buocrazia* dalam bahasa Italy, dan *bureaucracy* dalam bahasa Inggris yang dalam perkembangannya kemudian menjadi analog dengan *democracy*. Kata *bureaucracy* akhirnya diturunkan menjadi *bureaucrat*, *bureaucratism*, *bureaucratist*, dan yang akhir-akhir ini populer adalah *bureaucratization*.

Baron de Grimm, filsuf Perancis dalam surat tertanggal 1 Juli 1764 menulis: ... "Kita tergodanya oleh gagasan pengaturan dan menolak untuk memahami bahwa ada suatu ketidakterbatasan di suatu negara besar di mana pemerintah negara itu sendiri tidak memperhatikannya". Satu tahun setelah penulisan suratnya, Baron de Grimm kembali menuliskan pendapatnya bahwa semangat hukum Perancis yang sesungguhnya adalah "birokrasi" yang oleh M. de Gournay biasanya sangat dikeluhkan sebagai para pejabat, juru tulis, para sekretaris, para inspektur dan para intendant (manajer) yang diangkat bukannya untuk menguntungkan kepentingan

umum (Albrow, 1996, hal. 1). M. de Gournay<sup>1</sup> pernah menyatakan bahwa di Perancis, masyarakat telah mengidap sebuah penyakit yang disebut "*bureaumania*".

Walaupun berasal dari pemikiran para fisiokrat Perancis, penggunaan istilah birokrasi pada awal abad ke-19 hanya terbatas pada karya para novelis. Balzac dengan novelnya "*Les Employes*" (1836), separuh kisahnya menceritakan cara-cara birokrasi bekerja dengan nada ejekan sarkastis sebagaimana kutipan berikut :

"Sejak 1789, Negara atau yang anda sebut La Patrie telah menempati kekuasaan tertinggi... dan karena itu birokrasi, kekuasaan raksasa yang dipegang para *pigmie* muncul di dunia. Barangkali Napoleon memperlambat pengaruhnya sesaat, karena ternyata segala sesuatu dan semua manusia tunduk kepada keinginannya.... Akan tetapi birokrasi telah diorganisasikan secara mantap dibawah pemerintahan konstitusional yang memiliki kebaikan alamiah sedang-sedang saja, yang senang dengan pernyataan dan laporan-laporan yang pasti, suatu pemerintahan yang suka mencampuri urusan orang lain, ringkasnya seperti isteri pemilik toko kecil". (Albrow, 1996: hal. 3-4).

Sementara itu dalam kamus politik bahasa Perancis, "*Petit Dictionnaire Politique et Social*", M. Bullock (1896 : hal. 94 dalam Albrow,1996, hal 4) berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Jerman karena didasarkan pada fakta bahwa selama Revolusi Perancis, surat kabar Jerman selalu melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perancis dan menyebut istilah birokrasi tanpa penjelasan lebih lanjut. Di luar pers, acuan birokrasi paling awal dalam bahasa Jerman dimunculkan oleh Christian Kraus -- seorang teman Thomas Kant -- dalam surat yang ditulis tahun 1799. Surat tersebut memperbandingkan negara Prussia dan Inggris: "....negara Prussia jauh dari bentuk monarki yang tidak terbatas, tetapi merupakan

<sup>1</sup> Vincent de Gournay (1712-1759) menerjemahkan karya-karya penulis terkenal tentang ekonomi, seperti Child dan Culpepper, ke dalam bahasa Perancis. Ia sendiri adalah seorang *intendant du commerce*, ia juga salah satu anggota penting kelompok ekonomi yang dikenal sebagai Physiokrat. Untuk riwayat hidupnya lebih rinci termuat dalam G. Schelle, Vincent de Gournay, 1897. (Albrow, 1996, hal 129).

aristokrasi terselubung secara halus,... yang memerintah negara tersebut dengan terang-terangan sebagai sebuah birokrasi". Johan Gorres dalam "*Europe and the Revolution*" (1821) juga berjasa memasyarakatkan birokrasi di Jerman. Gorres menganggap birokrasi sebagai institusi sipil yang analog dengan kedudukan tentara. Birokrasi menurutnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan militer; yaitu disiplin, promosi, penghargaan kelompok dan sentralisasi." *The Popular Encyclopedia*" (1837) tercatat merupakan salah satu literatur awal di abad ke-19 yang memuat satu butir tentang sistem biro atau birokrasi (Blackie, Glasgow, 1837, hal. 755 dalam Albrow, 1996, hal. 4 -7)

Sementara itu, munculnya istilah birokrasi di Inggris antara lain diawali oleh komentar pendek Carlyle tentang birokrasi dalam "*Letter Day Pamphlets*" (1850) : "...kesusahan kontinental...saya lihat tidak mungkin terjadi di Inggris. Demokrasi cukup hangat di sini". Teori birokrasi Inggris abad ke-19 paling jelas tersimpul dalam tulisan sejarawan Ramsay Muir, 1910, berjudul "*Bureaucracy England*". Namun demikian, studi empirik pertama tentang birokrasi, yaitu "*Bureaucracy and its Operation in Germany and Austria-Hungary*" ditulis oleh orang Austria, Frederich von Schulte yang termuat dalam *Contemporary Review* pada 1880 ".(Albrow, 1996 : 6-10).

*The Study of Sociology 45* (Herbert Spenser ; 1837 : hal 111 dalam Albrow, 1996, hal. 7) menaruh perhatian terhadap penentuan batas dan fungsi negara serta seringkali menyebut birokrasi dalam konteks komentar-komentarnya tentang Perancis. Namun pada tahun 1848, John Stuart Mill dalam "*Principles of Political Economy*" menyusun teori yang menentang pemusatan segala ketrampilan dan pengalaman dalam menangani kepentingan-kepentingan besar di tangan birokrasi

argumentasi politik dan menawarkannya sebagai suatu kategori pokok untuk ilmu sosiologi yang bersifat embrionik. Sayang sekali Mosca tidak melanjutkannya, hingga pada tahun 1911, Robert Michael menguji lebih lanjut dalam bukunya "*Political Parties*". Selanjutnya, pokok pikiran analisis Mosca dan Michaels disatukan oleh Weber melalui pemikirannya dalam dua sumber penting tentang birokrasi yaitu "*Wirtschaft und Gesellschaft*" (1921), yang terbit setelah Weber meninggal. Sumber penting ketiga adalah karya Weber yang tidak terlalu populer, yaitu "*Parliament and Government in the Newly-Organized Germany*" (1918) (Albrow, 1996). Hal Meskipun dikatakan lalai dan telah meninggalkan aspek penting pemikiran awal birokrasi, tak dapat dipungkiri bahwa beranjak dari pemikiran Weber inilah berkembang berbagai bentuk studi tentang birokrasi dalam berbagai konteks ilmu sosial.

### 2.1.2. Pengertian dan Karakteristik Birokrasi

Pada konteks politik, awalnya Mosca (1920 : hal 83-4 dalam Albrow, 1996) dan Michael mempunyai pendapat yang sama tentang birokrasi, yaitu sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang mempunyai ciri spesialisasi dan sentralisasi dengan memanfaatkan pekerja dalam kepegawaian negara yang digaji sesuai dengan bakat, ketrampilan dan pendidikan untuk mengelola hierarki jabatan yang pada akhirnya akan mengasingkan mereka sebagai minoritas dari keanggotaan mayoritas negara atau organisasi. Birokrasi antara lain juga disebut sebagai suatu sistem kontrol pemerintahan yang sepenuhnya berada di tangan pejabat dengan kekuasaannya yang dapat membuat warga negara terancam (Laski, 1930: hal 70 dalam Albrow, 1996), suatu pemerintahan yang membedakan dua macam kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengatur dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (Brecht, 1954 dalam Albrow,

1996), yaitu sebagai sebuah model (Yates, 1982) dan sebagai ideologi (Wamsley, 1992). Sementara itu, Marx -- sebagaimana dikutip oleh P. Naville dalam *Le Nouveau Leviathan* (1957 : hal 98-101 dalam Albrow, 1996) -- menyatakan pandangannya tentang konsep birokrasi secara agak berbeda dengan pemikirannya yang cenderung ideologis, di mana *bureaucracy* dipandang sebagai suatu sistem administrasi dengan kekuatan yang agak otonom, mengembangkan eksistensinya sendiri dan memerintah masyarakat anggota organisasi menurut kepentingannya sendiri, di mana orang-orang yang menjalankan sistem tersebut disebut sebagai *bureaucrat*. (Albrow, 1996).

Selain dalam konteks politik, pemaknaan birokrasi juga dilakukan pada lingkup administratif yang antara lain terdiri sebagai berikut:

1. Acuan terhadap metode administrasi tertentu yang melibatkan profesionalisme, hierarki, departementalisasi dan orientasi pada dokumen tertulis ( Charles I, 1961: hal 459).
2. Sebuah bentuk administrasi organisasi besar dan kompleks dengan ciri-ciri: spesialisasi, hierarki otoritas, aturan dan sistem pelaporan personel (Sayre, 1964).
3. Suatu bentuk administrasi yang membedakan organisasi satu dengan lainnya (Downs, 1967 : hal. 24-31)

Sementara itu, keberadaan birokrasi pada lingkup organisasi dan manajemen antara lain dikatakan sebagai suatu mekanisme sosial (organisasi) yang memaksimalkan efisiensi dan memiliki karakteristik yang khas (Weber,1920 dalam Gerth & Mills, 1991), mode pengorganisasian untuk menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi besar dan kompleks (Francis dan Stone, 1956 : hal 3), serta susunan kegiatan rasional yang didefinisikan secara jelas yang diarahkan pada pencapaian

tujuan organisasi (Leonard, 1966 : hal 81). Senada dengan Weber, menurut Downs, birokrasi adalah sekelompok pranata atau lembaga tertentu (biro) yang membedakannya dengan organisasi yang lain atas dasar beberapa ciri berikut :

- (1) berukuran besar --- para anggota pada jenjang tertinggi hanya mengenal tidak lebih dari separo dari seluruh anggota organisasi,
- (2) sebagian besar anggotanya adalah pekerja purna waktu yang sebagian besar pendapatan mereka bergantung pada pekerjaannya dalam organisasi,
- (3) penggajian awal pegawai, promosi dalam biro dan keberadaan anggota dalam biro, sekurang-kurangnya sebagian, lebih didasarkan pada beberapa jenis penilaian kinerja atau peranan mereka sesuai dengan yang diharapkan organisasi.

Birokrasi juga merupakan metode khusus untuk pengalokasian sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan tertentu ( Downs, 1967 : hal. 24-31).

Terdapat juga beberapa ahli yang memberikan pengertian bernada negatif tentang birokrasi sebagai berikut: yaitu sebagai antitesis vitalitas administratif dan kreativitas manajerial yang merupakan susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas dan depersonalisasi (Dimock, 1949 : hal 198), pengaturan manajemen kelembagaan untuk menjamin keuntungan sistem-sistem dalam organisasi (Dimock, 1960, hal. 4) serta sebagai segala bentuk ketidaksempurnaan dalam struktur dan pem-fungsian dalam organisasi-organisasi besar (Strauss, 1961, hal. 41).

Berdasarkan pada elaborasi di atas, beberapa konsep identifikasi *bureaucracy* dapat dipahami sebagai berikut:

1. Bentuk sistem pemerintahan
2. Kumpulan pejabat (*bureaucrat*) yang melaksanakan fungsi berdasarkan pada hierarki.
3. Lembaga atau biro
4. Bentuk inefisiensi
5. Bentuk sistem administrasi
6. Bentuk pengaturan yang menciptakan 2 golongan; yang mengatur dan yang berbuat sesuatu.
7. Metode atau cara yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan .

Seluruh pengertian tersebut di atas dapat dikatakan mengandung karakteristik birokrasi yang hampir sama, yaitu bahwa di dalam birokrasi terdapat:

1. Hierarkie dan Struktur Organisasi.
2. Impersonalitas Operasi.
3. Peraturan yang ekstensif.
4. Kerumitan tugas - tugas administratif dan ketergantungan pada dokumen-dokumen tertulis.
5. Kerahasiaan.
6. Pegawai organisasi berasal dari personal yang secara khusus dibina dan digaji berdasarkan kemampuan, pendidikan dan karir (*merit system*).

Fokus bahasan dalam tesis ini mendasarkan *bureaucracy concept* dengan karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Downs (1967) yang tidak lain merupakan rumusan identifikasi birokrasi rasional yang dirumuskan oleh Weber (Gerth & Mills, 1991). Karakteristik konsep birokrasi dalam pandangan keduanya mencakup banyak aspek karakteristik yang dibahas oleh banyak ahli lainnya, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, dan merupakan karakteristik dasar konsep birokrasi modern yang bahkan tetap digunakan hingga sekarang.

## 2.2. TINJAUAN SINGKAT MANAGEMENT CONTROL

### 2.2.1. Pengertian *Management Control*

*Webster's New Collegiate Dictionary* (1967) memuat definisi *control* sebagai aktivitas : "... to exercise restraining or directing influence over regulate" (Green and Welsh ; 289). Bahasan tentang *control* banyak ditemukan dalam berbagai literatur organisasi yang pada awalnya antara lain dipelopori oleh : Diemer (1915), Davis (1928), kemudian Mintzberg (1979), Litterer (1981) dan Daft (1983). Sebagian besar literatur manajemen sepakat bahwa *control* merupakan proses penetapan *performance standars, monitoring performance* dan *corrective action* untuk mencapai *goals* organisasi (Daft and Fizgerald,1992 ; Donnelly et al., 1995; Gatewood et al., 1995 ; Schermerhorn et al., 1995). Sedikit lebih luas, Anthony & Govindarajan (1998) menyatakan bahwa *management control* adalah suatu proses strategis yang digunakan manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi dalam kegiatan implementasi strategi organisasi.

*Managemeni control* secara garis besar terdiri dari 5 komponen: *performance measurement, strategy, organizational structure, direction* dan *motivation* (Rotch :1993). *Concepts of control* --- yang merupakan dasar penting bagi organisasi --- telah banyak sekali dibahas dalam berbagai literatur manajemen.

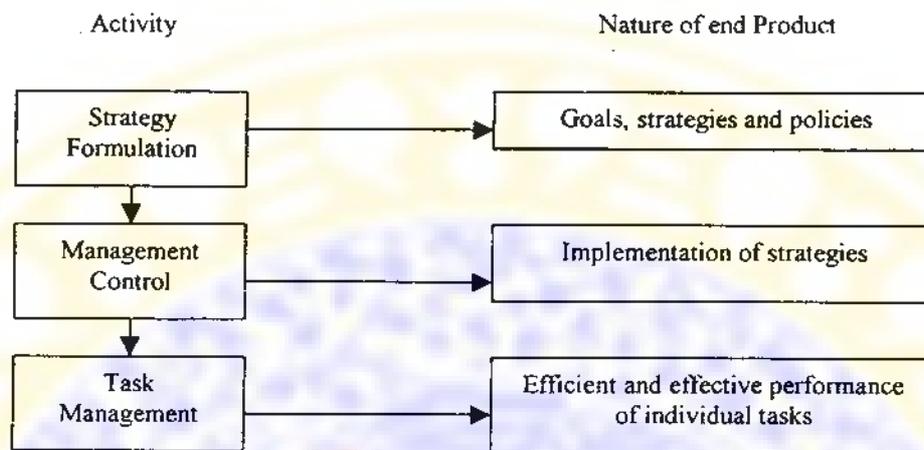
Identifikasi terhadap *control* dan pengaruhnya dilakukan dengan menganalisa beberapa aspek: pembentukan strategi organisasi (Child, 1972 ; Ouchi, 1977 ; Perrow, 1967, 1986 ; Pfeffer & Salancik, 1978 ; Williamson, 1975), pengembangan dan desain struktur organisasi (Etzioni, 1961 ; Lawrence & Lorsch, 1967 ; Ouchi, 1979 ; Thompson, 1967), seleksi, sosialisasi dan evaluasi personel ( Edstrom & Galbraith, 1977 ; Freidson & Rhea, 1963 ; Koontz & O'Donell, 1976 ; Lawler, 1976 ;

Vollmer & Mill, 1966), serta proses kepemimpinan dan motivasi (Lawler, 1976 ; Lawler & Rhode, 1976 ; Tannenbaum, 1968). Pendapat lain ditawarkan oleh Stephen Maguire (1999) yang menyatakan : "*a variety of management control such as strategic planning, financial forecasting, budgeting, operation management systems, performance evaluations and management information systems... One of the underlying of control is that those who command are more knowledgeable and capable and those serve need direction*".

### 2.2.2. Posisi Management Control

*Management Control* merupakan salah satu dari beberapa bentuk perencanaan dan pengendalian aktivitas dalam organisasi di samping *Strategic Formulation* dan *Task Control*. Bila *strategic formulation* adalah proses pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi baru pada level top-management dan berfokus jangka panjang, *task control* adalah proses yang dilakukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas tertentu pada level yang paling rendah dalam organisasi dengan fokus jangka pendek. Sementara itu, *Management control* dapat dikatakan sebagai sebarang aktifitas yang berada di antara *strategy formulation* dan *task control*. Secara eksplisit dapat dilihat pada gambar 2.1.1.

Perbedaan lain antara *task control* dan *management control* yang dapat diungkap adalah bahwa *task control* lebih bersifat *scientific* atau ilmiah, sedangkan *management control* melibatkan perilaku yang tidak akan pernah dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan matematis (Anthony & Govindarajan, 1998). Secara skematis, contoh bentuk-bentuk keputusan yang dapat dihasilkan dari proses *strategy formulation*, *task control* dan *management control* dideskripsikan dalam tabel 2-1.



Bagan 2.1.

**General Relationship among Planning and Control Functions**

Sumber : Anthony &amp; Govindarajan (1998 ; 9)

Tabel 2-1

**Examples of Decision in Planning and Control Functions**

<b>Strategy Formulation</b>	<b>Management Control</b>	<b>Task Control</b>
Acquire an unrelated business	Introduce new product or brand within product line	Coordinate order entry
Enter a new business	Expand a plant	Schedule production
Add direct mail selling	Determine advertising budget	Book TV Commercials
Change det/equity rato	Issue new debt	Manage cash flow
Adopt affirmative action policy	Implement minority recruitment program	Maintain personel record
Devide inventory speculation policy	Decide inventory levels	Reorder an item
Decide magnitude and direction of research	Control of research organization	Run individual research project

Sumber : Anthony &amp; Govindarajan (1998 : 16)

**2.2.3. Aspek Penting dalam *Management Control***

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh seluruh sub-unit organisasi adalah bahwa organisasi mempunyai tujuan non-finansial yang tidak kalah penting seperti : *market share, customer satisfaction, on-time delivery, employee morale* dan masih banyak lagi. *Management control* idealnya mencakup baik ukuran-ukuran finansial maupun non-finansial. *Management control* dengan demikian nampak sekali kental

dengan keterlibatan superior dan subordinate dalam bentuk interaksi antar individu melalui komunikasi, motivasi dan evaluasi. Jelas disini bahwa tidak ada cara mekanis yang dapat mendeskripsikan interaksi tersebut. Oleh karena itu, *management control* mutlak harus memperhatikan aspek perilaku.

*Management control* sebagai alat manajemen dalam membantu mengarahkan organisasi untuk mencapai *goal congruence* dan tujuan strategisnya, tentu saja harus berfokus pada *strategy execution* (Anthony & Govindarajan, 1998). Eksekusi terhadap strategi berarti memonitor implementasi strategi yang di dalamnya -- sebagaimana telah dijelaskan di atas -- mencakup struktur organisasi yang mencerminkan peranan, pelaporan, hubungan dan bentuk pertanggungjawaban atas aksi para anggota organisasi; manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap berbagai aktivitas melalui seleksi, training, pengembangan, promosi dan perekrutan karyawan serta *culture* - berupa seperangkat kepercayaan, tindakan dan norma yang secara eksplisit atau implisit menuntun tindakan manajerial.

#### 2.2.4. *Management Control dan Goal Congruence*

Tujuan utama *management control* adalah pencapaian *goal congruence*. Per definisi, *goal congruence* dalam suatu proses merupakan bentuk lain dari aksi yang menuntun anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang menjamin terpenuhinya kepentingan pribadi yang secara bersamaan juga selaras dengan tujuan organisasi. *Goal congruence* yang sempurna -- yaitu yang mutlak seimbang antara kepentingan pribadi anggota organisasi dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan -- bisa dikatakan tidak pernah terjadi.

*Goal congruence* dipengaruhi oleh *informal factor* yang terdiri dari *external factor* -- yaitu norma-norma perilaku yang diharapkan ada dalam masyarakat dimana

organisasi menjadi bagian di dalamnya -- dan yang seringkali diidentikkan dengan "work ethic" dan *internal factor* yang tidak lain adalah *culture* -- yang terdiri dari kepercayaan, tindakan, norma hubungan dan asumsi-asumsi sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan terdahulu.

*Internal factor* yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap *management control* adalah *management style*, yaitu tindakan manajer superior dalam melaksanakan pengendalian. Tindakan dan perilaku bawahan merupakan refleksi dari persepsi mereka terhadap tindakan atasan yang dimodifikasi tentu saja oleh perilaku mereka sendiri. Manajer dalam aktivitasnya masuk dalam seluruh bentuk dan ukuran organisasi dengan membawa gaya tersendiri. Sebagian manajer nampak karismatik, sementara beberapa lainnya begitu membosankan. Ada manajer yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertemu dan berdialog dengan para anggota organisasi (*management by working around*), namun sebagian sisanya menghabiskan waktunya untuk menulis dan menekuni laporan-laporan tertulis.

Desain bagan atau struktur dalam organisasi juga sangat berpengaruh terhadap *management control* dalam rangka pencapaian *goal congruence*. Garis yang menghubungkan suatu kotak dengan kotak lain dalam *organization chart* melukiskan organisasi formal yang mencakup di dalamnya otoritas formal, wewenang formal dan aliran pertanggungjawaban. Garis tersebut dapat juga berarti jalan bagi manajer dalam membuat keputusan dan mengkomunikasikan keputusan tersebut pada level di bawahnya melalui hirarki organisasi. Implikasi yang timbul, diabaikannya *personal goal* para anggota organisasi yang pada tataran selanjutnya mungkin memicu terjadinya konflik. *Management control* dimaksudkan untuk mengantarkan

organisasi pada titik tertentu yang berusaha merekonsiliasi konflik dengan kerjasama dalam organisasi.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian *goal congruence* melalui *management control* adalah *formal system*, berupa *rules* -- yaitu kependekan tangan dari segala bentuk instruksi dan pengendalian secara formal yang di dalamnya mencakup *instruction, practices, job description, standard operating procedures, manual dan codes of ethic* (Anthony & Govindarajan, 1998 : 57).

## 2.3. KONSEP IDEOLOGI

### 2.3.1. Tinjauan Singkat Konsep Ideologi

Telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat definisi-definisi maupun karakteristik tentang konsep birokrasi yang terkait dengan posisi ideologis para pencetusnya. Selain itu, uraian dalam bagian analisis dan pembahasan yang mendasarkan diri pada Teori Kritik terhadap pola hubungan konsep birokrasi dan *management control*, tak pelak membutuhkan suatu pemahaman khusus tentang term ideologi untuk dua tujuan: (1) Memberikan suatu kerangka pemahaman terhadap Teori Kritik yang memiliki posisi sangat jelas secara ideologis, (2) mengungkapkan hubungan-hubungan ideologis antar ide dan konsepsi dalam ilmu pengetahuan -- di mana dalam hal ini adalah konsep birokrasi dan *management control* -- serta hubungan-hubungan ideologis antara ilmu pengetahuan dan realitas materialnya.

Pada awalnya istilah ideologi digunakan oleh Destertt de Tracy pada akhir abad ke-18 dan dikembangkan penuh sebagai konsep selama abad ke-19, walaupun pemikiran yang lebih dalam dengan beberapa persoalan yang dimunculkan oleh

pengertian ideologi telah dimulai jauh lebih awal (Larrain, 1996, hal. 7). Terdapat fenomena yang menghubungkan antara legitimasi intelektual dari dominasi sosial dengan berbagai sumber penyimpangan mental dalam pengetahuan realitas sepanjang terdapat masyarakat kelas-kelas. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa dalam sejarah umat manusia ideologi bukanlah fenomena baru.

Sebagai salah satu konsep yang paling rumit dan sukar dimengerti yang terdapat dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial, ideologi tidak saja bertalian dengan beragam pendekatan teoretis yang menunjuk arti dan fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi ideologi juga merupakan konsep yang sarat dengan konotasi politik dan digunakan secara luas dengan makna yang beragam. Keberagaman konsep ini, menyebabkan seorang pakar sekali-pun akan kesulitan bila ingin menarik satu pemahaman yang sinkretis melalui rekonsiliasi berbagai konsep tersebut. Berbagai alternatif kebingungan yang nyata selaslu muncul kanakala seseorang mencoba mendeskripsikan ideologi, atau bahkan hanya untuk membedakan ideologi sebagai sebuah konsep dengan sebetuk konsepsi yang lain, ilmu pengetahuan misalnya. Karena perbedaan sudut pandang dalam merefleksikan konsep ideologi seringkali bersifat ideologis pula.

Perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan antara lain : **pertama**, apakah ideologi memiliki arti positif atau negatif (Larrain, 1996, hal. 2). Di satu pihak, ideologi dapat dimengerti dalam terminologi-terminologi yang sungguh negatif, sebagai konsep kritis yang berarti sebetuk kesadaran imitatif kebutuhan untuk melakukan desepsi. Maksudnya adalah bagaimana membalikkan kesadaran ide tentang realitas sosial, yaitu nilai kognitif dari ide-ide yang dipengaruhi mitos-mitos dalam suatu pernyataan terbuka. Di lain

pihak istilah ideologi dapat dimengerti pula sebagai istilah yang positif; yaitu sebagai ekspresi dari sudut pandang mengenai kelas. Sampai pada tingkat ini orang dapat berbicara tentang "ideologi" secara umum sebagai konfigurasi pendapat, teori dan sikap yang dibentuk dalam kelas untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan kelas. Nilai kognisi dari ide-ide ideologis itu selanjutnya dapat dinafikan sebagai persoalan yang berbeda. **Kedua**, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat diajukan untuk mengetahui apakah ideologi memiliki sifat yang benar-benar subyektif dan memiliki watak psikologis atau sebaliknya, seluruhnya tergantung pada faktor-faktor obyektif (Larrain, 1996, hal 2). Jika subyektif, ideologi dipahami sebagai perubahan bentuk kesadaran, yang entah bagaimana, tidak mampu untuk memahami realita sebagaimana adanya. Alternatif lainnya, jika obyektif, ia muncul sebagai bentuk penipuan yang disebabkan oleh realitas itu sendiri. Artinya bukan subyek yang memutarbalikkan realitas, tetapi realitas sendiri yang menipu subyek. Selagi persepsi subyektif menekankan peranan individu, golongan dan partai dalam produksi ideologi, pandangan obyektif menganggap ideologi sebagai pengisian struktur-struktur dasar masyarakat. **Ketiga**, kedudukan problematik timbul mengenai apakah ideologi harus dianggap sebagai suatu bentuk fenomena tertentu dalam deret luas fenomena super- struktur, atau apakah ideologi tersebut sesuai dan ko-ekstensif dengan -- meminjam istilah Karl Marx -- seluruh lingkungan "super struktur ideologi"<sup>2</sup> (Larrain 1996, hal. 30). Sikap pertama mengandaikan pada konsep ideologi yang restriktif karena tidak semua obyek kultural akan menjadi ideologi.

---

<sup>2</sup> Istilah ini merupakan istilah Marx untuk mengidentifikasi wilayah struktur-struktur kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial-budaya, agama, dimana yang berperan vital menurutnya adalah struktur ekonomi. Keterangan tentang ini dapat ditelusuri pada literatur-literatur yang membahas tentang pemikiran Marx Tua.

Sebaliknya, yang kedua menyamakan ideologi dengan tingkat masyarakat yang obyektif yang mencakup seluruh bentuk kesadaran sosial. **Keempat**, yaitu persoalan penting sebagai dasar untuk menguraikan pengaruh ideologi; yakni bagaimana orang harus mengerjakan berbagai bentuk relasi antara ideologi dan ilmu pengetahuan (Larrain, 1996, hal. 3). Ideologi dapat dipandang sebagai antitesis ilmu pengetahuan, yaitu dapat dipersamakan dengan pre-konsepsi atau elemen-elemen tidak rasional yang mengganggu yang mencegahnya dari upaya-upaya pencapaian kebenaran. Maka bilamana metode ilmiah diterapkan dengan ketat, ideologi diduga akan dapat terisolir. Sementara pandangan lain cenderung melihat bahwa mungkin sekali ideologi lebih menekankan hal-hal penting (*common feature*) dari ilmu pengetahuan dan ideologi daripada perbedaannya. Dengan begitu, ideologi dan ilmu pengetahuan akan memiliki basis bersama dalam suatu perspektif tentang golongan yang melahirkannya. Dalam hal ini ideologi tidak dapat diatasi oleh ilmu pengetahuan dan sebaliknya, ilmu pengetahuan sendiri dapat menjadi ideologis.

### 2.3.2. Sains dan Ideologi

Hubungan antara ilmu pengetahuan dengan ideologi tidak mudah dipilah menurut jenisnya. Keruwetan masalah ini, lagi-lagi, disebabkan oleh beragam makna yang dapat diterima dari masing-masing konsep oleh banyak pemikir dan aliran pemikiran. Dalam hal ini, skema penjelasan yang baik dibuat oleh Larrain untuk memudahkan pemetaan aliran pemikiran tentang konsepsi ideologi (Larrain, 1996, hal. 199-249).

**Pertama**, pembahasan hubungan ideologi dengan ilmu pengetahuan dapat dimulai dari sudut pandang ideologi dan pengertiannya. Di sini terdapat dua pengertian luas yang dapat diasosiasikan dengan ideologi sebagaimana telah

disinggung di awal; ideologi yang dipahami secara positif dan ideologi sebagai sesuatu yang memiliki muatan negatif (Larrain, 1996, hal.199).

Ideologi dalam pengertian positif berkenaan dengan sistem pendapat, nilai dan pengetahuan yang berhubungan dengan kepentingan golongan tertentu dengan berbagai variasi muatan kognitifnya (Larrain, 1996, hal. 199-249)<sup>3</sup>. Distorsi dipandang bukan sebagai esensi dari konsep ideologi. Dengan begitu, mungkin ada ideologi yang didasarkan pada pendapat ilmiah maupun yang didasarkan pada dugaan pra-ilmiah atau non-ilmiah. Konsekuensinya, ideologi bukanlah konsep yang dibedakan secara tegas dari ilmu pengetahuan. Ideologi mungkin dapat "ilmiah". Jika tidak, bukan disebabkan oleh kondisinya yang menjadi ideologi, tetapi lebih disebabkan oleh dikembangkannya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam lingkungan ideologi. Akibat terpenting dari konsepsi ini adalah hilangnya konsep ideologi sebagai pengertian kritis.

Ketika konsep ideologi diangkat dalam pengertian negatif, maka perbedaan antara ideologi dan ilmu pengetahuan tampil ke depan. Ideologi adalah pengetahuan yang dibiaskan, sedang ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang benar. Selagi ideologi tetap terjebak dalam keadaannya, ilmu pengetahuan diandaikan mampu menembus bentuk-bentuk realita yang fenomenal, menyingkap hukum-hukum dan hubungan yang substansial di bawah permukaan (Larrain, 1996, hal. 200). Ada dua cara berbeda dalam menerangkan perbedaan antara konsep ideologi yang negatif dan ilmu pengetahuan. Ideologi dapat diposisikan sebagai inversi dan antitesis dari ilmu pengetahuan secara "salah" dan "benar". Distorsi ideologi dianggap sebagai

---

<sup>3</sup> Ini adalah pemikiran khas dari Marxisme dan turunannya. Dapat dipelajari uraian Jorge Larrain tentang konsep ideologi Karl Marx dalam Jorge Larrain, op.cit .hal.199-249

kesalahan kognitif semata, sementara ilmu pengetahuan adalah sarana untuk melampaui kesalahan, *dus* dapat melampaui ideologi. Cara memahami hubungan seperti ini menjadi ciri khas dan asal usul tradisi positivis, misalnya *Wina School* dan *Althusser Structuralism* (Larrain, 1996, hal.201-202 dan Veeger, 1993, hal.231-253). Tradisi pemikiran ini banyak berhubungan dengan kriteria demarkasi antara ilmu pengetahuan dan ideologi.

**Kedua**, ideologi dapat diinterpretasikan berbeda dari ilmu pengetahuan, meskipun bukan antitesisnya. Ideologi tidak hanya kesalahan kognitif semata yang dapat dieliminasi dengan kognisi berlebihan<sup>4</sup>. Ilmu pengetahuan juga belum tentu dapat menembus substansi dari realitas. Ada kesalahan yang tidak ideologis dan ada kebenaran yang mungkin didapat di luar kognisi. Kekhasan ideologi dari perspektif ini adalah kenyataan bahwa ideologi menyembunyikan kontradiksi. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan belum tentu dapat mengatasi ideologi karena ideologi berakar pada kontradiksi sosial. Penyelesaian kesalahan ideologis dengan demikian diselesaikan dengan jalan penyelesaian kontradiksi.

Bila sekarang diambil posisi dari sudut pandang ilmu pengetahuan -- istilah kedua dari hubungan yang dianalisis -- terdapat tiga kemungkinan yang muncul sebagai alternatif pandangan. **Pertama**, menganggap ilmu pengetahuan memiliki identitas universal sehingga tidak ada perbedaan fundamental antara ilmu-ilmu alam dan sosial. Posisi ini dipertahankan oleh sebagian besar Mazhab Positivis (Larrain, 1996, hal. 201). Pada umumnya, sudut pandang positivis menerima pemikiran yang menyatakan bahwa metode ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah uniter, meskipun mungkin ada keistimewaan individual. Konsepsi ini menganggap ilmu

---

<sup>4</sup> Pemikiran yang berakar dari tradisi Historisisme Jerman serta beberapa aliran Marxisme awal

pengetahuan ilmiah -- yaitu yang memperhatikan fakta-fakta obyektif, dapat diperiksa benar tidaknya (*verifiable*), dan yang mempelajari obyeknya melalui metode tertentu yang logikanya umum dan lazim bagi semua ilmu pengetahuan -- adalah *a-ideologis* dan merupakan antitesis dari ideologi. Dapat disimpulkan bahwa posisi ini bercirikan rasionalisme yang dapat membuat pengetahuan ilmiah menjadi paradigma dari semua kognisi yang patut diperhatikan dan yang menghadapi ideologi sebagai "sesuatu yang sama sekali lain" (*total other*) yang harus diatasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan ilmiah (Larrain, 1996, hal. 201-202).

Kemungkinan kedua hadir manakala ilmu-ilmu pengetahuan sosial (*geisteswissenschaften*) dibedakan secara tegas dari ilmu pengetahuan eksakta (*naturwissenschaften*). Terdapat beberapa kondisi yang awalnya romantik dan idealis yang tidak menerima eksistensi dari satu pola pengetahuan yang sah (Larrain, 1996, hal. 202-203)<sup>5</sup>. Tradisi *hermeneutical* misalnya, menganggap bahwa kausalita, verifikasi empiris dan eksperimen tidak dapat diterapkan dalam pengetahuan sosial dan humaniora sehingga diperlukan semacam intuisi (pengertian atau *verstehen*) untuk mendukung pernyataan yang bermakna<sup>6</sup>. Sejarah manusia tidak dapat begitu saja diprediksi sebagai fenomena fisik menurut penyebab-penyebab tertentu dan hukum yang *verified*.

---

<sup>5</sup> Tradisi pemikiran idealis berasal dari filsafat Idealisme Jerman dengan pelopornya Immanuel Kant dan dilanjutkan oleh Hegel. Gagasan-gagasannya dapat dipelajari pada referensi-referensi tentang sejarah filsafat Idealisme Jerman, misalnya pada K. Bertens, 1983, *Filsafat Barat Abad XX, Jilid 1, Jerman-Inggris*, Gramedia, Jakarta.

<sup>6</sup> Terdapat uraian yang baik tentang *Hermeneutic* pada Bambang I. Sugiarto, 1997, *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta. Sugiarto menggolongkan *Hermeneutic* sebagai salah satu aliran dalam postmodernisme.

Perbedaan antara kedua pengetahuan ini memiliki *anteseden* yang langsung dalam mazhab Kantian dimana ada pembedaan antara *fenomenon* dengan *noumenon*. Dunia alam yang fenomenal tunduk pada hukum kausal, sedang dunia roh (*world of spirit*) yang noumenal hanya dapat dipahami melalui pengertian yang spesifik. Stedman Jones yang dikutip Larrain menyatakan bahwa *hermeneutic* tidak hanya mempertahankan tradisi Kantian, tetapi maju lebih jauh untuk menguatkan superioritas sejarah atas pengetahuan ilmiah (Larrain, 1996, hal. 203). Dunia manusia harus dikesampingkan dari pertalian penyebab-penyebab positif sejauh metode ini mencoba menggunakan supremasi hukum-hukum ilmiah yang deterministik atas segala hal.

Dari posisi *hermeneutic* yang anti-positivis dan agak konservatif, berkembanglah posisi-posisi lain yang sama-sama anti-positivis tetapi agresif. Marxisme dan kritiknya terhadap masyarakat borjuis yang menjanjikan aiat pengantar yang baik untuk melanjutkan garis pemikiran yang *anti-scientist* adalah pelopor diantaranya. Jika ilmu pengetahuan dan teknologi melayani kaum borjuis untuk mengeksploitasi golongan pekerja, maka sungguh menggoda untuk menyamakan manipulasi orang-orang yang berorientasi golongan dengan manipulasi alam yang instrumental, identifikasi yang memunculkan pengertian tentang ilmu pengetahuan sebagai ideologi (Larrain, 1996, hal. 203-204).

Lukacs mulai dengan mempelajari kecenderungan-kecenderungan reifikasi dalam masyarakat kapitalis dan segera mendapatkan keselarasan yang mencurigakan antara masyarakat kapitalis dan ilmu pengetahuan. Dalam menerima mediasi data sebagai basis untuk pekerjaan ilmiah, ilmu pengetahuan telah jatuh dalam reifikasi kaum borjuis yang secara khas menerima anggapan yang diberikan padanya sebagai

fondasi masyarakat yang tidak dapat diubah. Sementara itu, para pemikir Frankfurt lainnya melacak rasionalitas yang instrumental dan subyektif serta menembus industrialisasi ilmiah dengan kritik; kekuasaan terhadap alam telah bernetamorfosis menjadi basis penguasaan atas manusia. Marcuse dan Habermas barangkali adalah wakil-wakil yang paling jelas dari garis pemikiran ini, di mana keduanya mengkritisi teknologi dan praktek-praktek instrumental sebagai sumber ideologi baru dalam Kapitalisme yang sudah lanjut.

Tradisi yang memisahkan ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan humaniora berakhir dengan masuknya ide ilmu pengetahuan sebagai ideologi (Larrain, 1996, hal. 203). Selagi tradisi positivis percaya bahwa ideologi dapat dikalahkan pengetahuan, *German School* yang awalnya Kantian menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri mungkin ideologis. Yang pertama percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah paradigma pengetahuan, sedang yang kedua tidak melihat ilmu pengetahuan memiliki sifat-sifat khusus yang mendasari macam-macam pengetahuan lainnya. Sebaliknya, terdapat kemungkinan untuk melihat reifikasi yang terjadi dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama mengira bahwa kritik ideologi dilaksanakan oleh ilmu pengetahuan dan metodenya sedang yang kedua berpendapat bahwa kritik dilakukan oleh *critical theory* atau *critique of ideologies*.

Masih ada cara ketiga untuk memahami hubungan antara ideologi dan ilmu-ilmu pengetahuan. Posisi ini mengikuti pendekatan yang berbeda yang menolak identifikasi total dan demarkasi tajam antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan humaniora (Larraain, 1996, hal. 204). Hubungan antara keduanya berasal dari hubungan yang lebih besar yang sudah ada dalam masyarakat sejarah dan alam yang tidak tertentang, sebagaimana penggambaran Hegel tentang roh

absolut yang mengekspresikan dirinya kembali dalam perjalanan sejarah dialektika<sup>7</sup>. Sejarah masyarakat adalah bagian dari sejarah alam. Sejarah alam, secara bergantian hanya dapat digambarkan berhubungan dengan masyarakat manusia. Namun aspek-aspek keduanya tidak dapat diubah, mereka memelihara serangkaian hubungan yang dapat disebut sebagai *a differentiated unity*, satu kesatuan yang berbeda.

Kesatuan yang berbeda ini akhirnya dapat dibenarkan oleh kenyataan bahwa manusia adalah bagian dari alam selagi alam sendiri dijumpai oleh praktek manusia. Dalam konsepsi ini, ilmu pengetahuan bukan antitesis ideologi dan juga bukan sekedar bentuk ideologi. Ilmu pengetahuan tetap dapat menyumbangkan analisisnya untuk menunjukkan bentuk-bentuk ideologis sejauh ia dapat bebas dari bentuk-bentuk dominasi. Sebaliknya, ideologi bukan hanya sekedar kesalahan kognitif yang sederhana yang tidak didirikan di atas rasionalitas ilmiah. Namun ilmu pengetahuan bukanlah lingkungan terpisah, *immune* dari penetrasi ideologi. Ideologi pun dapat mencoba menempatkan diri sebagai ilmu pengetahuan. Jorge Larrain mempercayai bahwa inilah sesungguhnya posisi titik pandangan Karl Marx secara epistemologis tentang konsepsi ideologi (1996, hal. 204-205).

### 2.3.3. Budaya Positivisme

Embrio pemikiran Positivisme terhadap konsepsi ideologi awal yang mengakar dalam tradisi Pencerahan adalah bermula dari sejumlah pertanyaan kritis mengenai berbagai penghalang ilmu pengetahuan, yaitu tentang elemen-elemen tidak rasional yang mengganggu untuk dapat mengerti realita sepenuhnya. Hasil karya Bacon (1620) *Novum Organon*, yang dilanjutkan oleh Descartes (1637) dalam

---

<sup>7</sup> Konsep dialektika Hegel merupakan konsep dialektika Ide Absolut yang terasing, kemudian menemukan kembali identitasnya dalam perjalanan dialektis sejarah hingga mencapai kesempurnaannya

*Discourse de la Methode*, pada prinsipnya adalah tulisan-tulisan metodologis pertama yang secara sistematis mulai meragukan pendekatan-pendekatan tradisional terhadap ilmu pengetahuan (Larrain, 1996, hal. 10). Hal ini kemudian dikaitkan dengan kebutuhan untuk pencarian metode baru yang dapat mengatasi kekurangan pemikiran gaya Aristotelian abad pertengahan. Descartes tetap berada pada tingkat filosofis dan deduktif sementara Bacon lebih menekankan pada ilmu pengetahuan dan sifat-sifat observasionalnya.

Bagi Bacon, pengetahuan alam yang observasional tidak dapat berhasil jika tidak bebas dari faktor-faktor irrasional yang menutup pemikiran manusia, misalnya benda-benda mitos atau pengertian-pengertian palsu yang disebutnya sebagai konsep "idola" yang menipu pemahaman (Larrain, 1996, hal. 11-12). Inilah yang kemudian membangun orientasi empiris ilmu pengetahuan terhadap alam dan hukum-hukumnya dengan menegasi secara agresif mitos-mitos -- baik metafisis maupun teologis -- jaman pra-pencerahan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikembangkan sebagai fundamen ilmu pengetahuan, berusaha menjadikan realitas duniis fisik sebagai obyek studinya dengan target memahami hukum-hukumnya.

Descartes maju lebih jauh dengan menawarkan basis filsafat rasionalisnya dengan prinsipnya yang terkenal, *je pens donc je suis, cogito ergo sum*; saya berfikir maka saya ada (Budiman, 1997, hal. 21-36). Manusia menjadi obyek berfikir (*res cogitans*) yang berhadapan dengan realitas eksternal yang dipikirkan (*res extensa*). Basis ontologi ini melahirkan pandangan dikotomis yang tajam terhadap subyek-obyek, dimana oposisi subyek-obyek ini sekaligus menegaskan supremasi manusia di atas alam sebagai obyek penaklukkannya. Pemahaman dicapai dengan pandangan yang berjarak dan "netral" terhadap obyek agar dapat dicapai pengetahuan yang

obyektif. Distansi antara subyek dan obyek inilah yang dimediasi oleh ilmu pengetahuan (*ergo*).

Ilmu pengetahuan modern akhirnya mengambil alih fungsi yang khas dalam khasanah peradaban. Berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan filsafat yang lebih tua, maka ilmu pengetahuan empiris sejak jaman Galileo berkembang dalam suatu sistem referensi yang metodologis, yang mencerminkan suatu ambisi penguasaan teknis. Akselerasi kemajuan ilmu pengetahuan dibarengi oleh upaya untuk memberlakukan kaidah-kaidahnya dalam prinsip kerja instrumental untuk mendukung kerja manusia. Mengikuti alur yang dibangun Bacon dan Descartes sebelumnya, konstruksi awal ini selanjutnya diadopsi pula oleh Auguste Comte dalam lapangan ilmu pengetahuan sosial (Budiman, 1997, hal. 22, dan Veeger, 1993, hal. 16-36). Menurut Comte (Larrain, 1996, hal. 22) :

Keadaan teologis dan metafisik dari setiap ilmu pengetahuan memiliki satu ciri khas yang ada persamaannya; predominasi imajinasi atas observasi. Satu-satunya perbedaan yang terdapat di antara mereka di bawah titik pandang ini adalah bahwa dalam yang pertama imajinasi asyik dengan makhluk-makhluk sakti, sementara dalam yang kedua dengan abstraksi yang diwujudkan.

Comte mengira bahwa dari studi tentang sejarah kecerdasan manusia, dia telah menemukan hukum-hukum universal yang fundamental. Menurutnya, konsepsi dan teori-teori telah melampaui tiga tingkatan teori yang berbeda; teologis atau hal-hal yang mengawang, metafisika atau abstrak dan ilmiah atau positif. Hukum ini mengumumkan berakhirnya periode metafisik dan dimulainya tingkatan baru, di mana konsepsi yang spekulatif akan digantikan oleh ilmu pengetahuan dan fakta-fakta. Filsafat positif, demikian Comte, adalah satu-satunya jalan untuk dapat mendirikan tata tertib sosial yang rasional (Larrain, 1996, hal. 23). Ilmu pengetahuan

pada gilirannya memegang peranan penting sebagai kekuatan independen yang dapat membebaskan imajinasi rasional untuk memunculkan preposisi yang tak dapat disangkal dan secara bersamaan menjadi basis kemajuan dan kelayakan seluruh organisasi masyarakat.

Senada dengan pandangan demikian adalah Emil Durkheim, seorang penganut "sosiologisme yang kokoh"<sup>8</sup>, yang mencoba membangun dasar-dasar sosiologinya dalam epistemologi Positivisme (Durkheim, 1986, hal. 7). Emil Durkheim, sosiolog yang diakui sebagai salah satu dari tiga orang pendiri sosiologi modern -- Weber, Marx dan Durkheim -- bergerak secara ambisius dengan keinginannya membangun basis moralitas sosial dengan metodologi "ilmiah". Baginya, moralitas bukanlah sesuatu yang normatif, melainkan empiris (Durkheim, 1986, hal.10). Moralitas bukan saja menyangkut perilaku yang sewajarnya, melainkan juga sistem yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada, dan ini adalah sesuatu yang berada di luar diri si pelaku. Disamping bercorak positivistic, studi tentang moralitas semestinya juga bersifat rasionalistis dan sekuler. Durkheim percaya dapat merumuskan aturan-aturan tertentu, mengklasifikasikan dan menerangkan moralitas secara induktif, obyektif, rasional dan positivistic untuk dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Mengutip pernyataannya :

Tak ubahnya dengan para idealis yang memisahkan reaksi psikologis dan biologis begitu pula kami memisahkan (reaksi) psikologis dan sosial; satu-satunya penamaan yang kami terima adalah rasionalitas. Bahkan sesungguhnya, tujuan utama kami adalah menerapkan lebih lanjut rasionalitas ilmiah itu pada perilaku manusia (Durkheim, 1986, hal. 9).

<sup>8</sup> Istilah ini dikutip dari prakata Taufik Abdullah dalam buku terjemahan karya Emil Durkheim, 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, diterjemahkan oleh Taufik Abdullah dan A. C. Van der Leeden, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 7. Istilah ini merujuk pada para sosiolog yang menganut pemahaman bahwa masyarakat adalah suatu realitas yang *sui generis*.

Pernyataan Durkheim tersebut seolah semakin melingkarkan gelombang Positivisme sebagai warisan Pencerahan untuk menjadi *grand theme* dalam wilayah ilmu pengetahuan, tidak saja sebatas fenomenalitas bahkan jauh menembus batas-batas idealitas manusia.

#### 2.3.4. Kritik terhadap Budaya Positivisme

Usaha menempatkan analisis pada posisi skeptis terhadap ilmu pengetahuan yang desepsif untuk menguak potensi ideologisnya, ternyata memiliki beberapa argumentasi mengapa oposisi terang-terangan ilmu pengetahuan dengan ideologi sebagaimana tradisi Positivisme berlaku tidak digunakan sebagai pisau analisis dan bahkan digugat.

**Pertama**, posisi positivis jelas tidak sejalan dengan cara berpikir awal yang berusaha membedah ilmu pengetahuan dari sudut pandang alternatif. Tradisi Positivisme merujuk pada proses rasionalisasi untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan. Akal budi tidak lagi diarahkan pada dunia esensi yang bahkan dianggap omong kosong. Uraian ilmiah dikaitkan pada sarana dan tujuan melalui prosedur teknik untuk mencapai tujuan, tapi tidak dengan basis rasionalitas itu sendiri. Inilah uraian instrumental (Larrain, 1996, hal. 222)<sup>9</sup>. Uraian instrumental -- tanpa mengingkari obyektivitas rasionalitas dari tujuan-tujuan yang sesungguhnya -- cenderung mengabaikan hal-hal yang delusif dan bagaimanapun, menganggapnya di luar penilaian ilmiah. Apa yang tidak dapat diperiksa benar tidaknya dengan sarana "ilmiah" akan membentuk "dunia gelap" yang berada di luar kendali rasionalitas instrumental. Dunia yang tidak dapat dimasuki oleh uraian ilmiah ini tampak sebagai

<sup>9</sup> Istilah ini berasal dari Horkheimer yang menghadapkan rasio (*reason*) instrumental atau subyektif dengan rasio obyektif yang melihat esensi dalam realita. Untuk lebih jelasnya, lihat Sindhunata, 1983, op.cit., hal.97-99.

tidak rasional atau *mythical* dan dalam pengertian ini disamakan dengan ideologi. *Dus*, semua yang diluar fakta akhirnya menjadi ideologis. Perbedaan antara ideologi dan ilmu pengetahuan ada dalam kriterium *verifiability* yang secara sederhana diartikan oleh dua syarat ; **pertama**, observasi empiris dan eksperimentasi dan **kedua**, penerapan metode yang menjamin kepastian, yaitu prosedur yang lazim diterima yang memperoleh ketelitian dengan jalan mengumpulkan bukti empiris (Larrain, 1996, hal. 222).

Sejauh berkaitan dengan ideologi, tradisi Positivisme memiliki sejumlah pilihan filosofis. Tradisi ini dapat menyampaikan pesan penilaian bahwa "apa yang *non-testable* adalah ideologi", tetapi ini tidak dapat memberitahukan bagaimanakah keadaan menjadi "bermakna" (*meaningfull*). Atau sebaliknya, penilaian yang disampaikan dapat berarti "apa yang *verifiable* adalah bermakna, karena itu ideologi adalah omong kosong". Kelemahan yang jelas dari kedua posisi ini adalah bahwa identifikasi keadaan bermakna dengan kategori-kategori *verifiability* maupun *non-verifiability* secara bergantian merupakan posisi a-priori hingga menjadikannya *self-evident* (Larrain, 1996, hal. 226).

Penerapan observasi dan eksperimentasi empiris serta penggunaan prosedur yang lazim secara *an sich* ini mendapat kritik pula dari sebagian sosiolog secara berbeda. Tanpa mengecilkan arti penting dari penggunaan metode "ilmiah", penerapan metode ini secara membabi buta pada realitas sosial menjadi tidak realistis. Penerapan metode "ilmiah" memerlukan pengamatan terhadap fokus secara repetitif, di mana alam yang diamati tampak sebagai susunan orde teratur yang menghasilkan reaksi-reaksi reproduktif (Veeger, 1993, hal.234). Padahal, realita sosial sesungguhnya adalah spesifik dan unik. Meminjam kata-kata Marx,

yang sesungguhnya berbeda. Keduanya berpeluang menjadi benar atau menjadi salah.

### 2.3.5. Sains dan Pengaruh Ideologis

Terdapat perbedaan nyata pada dua sudut pandang yang berposisi dengan Positivisme terhadap ilmu pengetahuan dalam prosesnya menjadi ideologi. Sudut pandang pertama berasal dari konsep ideologi dalam arti positif yang menghubungkan ideologi dengan pandangan golongan tanpa harus mengakibatkan sifat negatif yang immanen bagi konsep ideologi (Larrain, 1996, hal. 205-249). Dengan begitu ideologi secara alamiah bergantung pada golongan tempat ideologi berhubungan. Dalam pengertian ini, ilmu dapat menerima sifat ideologi tanpa implikasi-implikasi negatif. Sifat ideologis dari ilmu pengetahuan hanya mengartikan hubungan khusus yang dibentuk oleh ilmu pengetahuan dengan golongan tertentu.

Posisi ini diawali secara jelas dalam garis pemikiran awal Karl Marx dalam *The Theses on Feuerbach* (Larrain, 1996, hal.211). Menurut Marx, ilmu pengetahuan bertujuan untuk menyingkap hubungan substansial dengan menembus apa yang tampak, tetapi bukan merupakan antitesis dari ideologi secara langsung atau kekuatan yang mengatasi ideologi. Marx menekankan pada hal-hal berikut (Larrain, 1996, hal.211) :

... Penelitian ilmiah baru mengenai produk-produk pekerjaan sejauh mereka merupakan nilai, hanyalah ekspresi-ekspresi materiil dan kerja manusia yang dihabiskan dalam produksi mereka, yang secara sungguh-sungguh menandai jaman dan sejarah perkembangan ras. Tetapi, samasekali tidak mengusir kabut melalui sifat sosial dari pekerjaan itu, di mana tampak bagi kita sebagai sifat obyektif dari produk-produk itu.

Meskipun ilmu pengetahuan telah menemukan esensi yang sesungguhnya, penampakan adalah bersifat tetap dan final bagi produsen. Kondisi tersebut analog

seperti fakta bahwa atmosfer itu tetap tidak berubah setelah penemuan ilmiah gas-gas komponennya. Artinya, orang hanya dapat mengusir rupa yang menyesatkan sejauh mampu mengubah praktek hubungan-hubungan sosial yang mendukung terjadinya bentuk-bentuk dominasi.

Walaupun ideologi tidak dapat dikalahkan oleh argumen teoretis, Marx percaya bahwa ilmu pengetahuan banyak menyumbang pada pengertiannya dengan membuka kedok-kedok kontradiksi dan tipu daya (Larrain, 1996, hal. 211). Namun ilmu pengetahuan sendiri bagi Marx bukanlah pengganti praktek revolusioner. Ilmu pengetahuan pun berpotensi menjadi subyek penetrasi ideologis sejauh direproduksi dan dikembangkan oleh praktek manusia dalam sejarah serta bertentangan dengan masyarakat. Ilmu pengetahuan tidak berada pada lingkungan khusus yang bebas dari berbagai kemungkinan kontradiksi golongan.

Masih menurut Marx, sebenarnya ilmu pengetahuan dalam dirinya memuat ambivalensi. Pada satu sisi ilmu pengetahuan memiliki efek yang membebaskan dan memainkan peranan penting dalam emansipasi manusia. Ilmu pengetahuan merupakan proses produksi dan kekuatan penakluk alam dengan memaksanya bekerja untuk kemakmuran manusia. Namun di sisi lain, Marx berpendapat (Larrain, 1996, hal. 211) :

...Ilmu pengetahuan yang direalisasikan dalam mesin muncul sebagai model yang berhubungan dengan para pekerja. Dan sebenarnya semua aplikasi ilmu pengetahuan, kekuatan-kekuatan alam dan produk-produk pekerjaan secara besar-besaran, didirikan di atas pekerjaan sosial. Mereka itu muncul hanya sebagai sarana untuk eksploitasi buruh.

Ilmu pengetahuan di bawah Kapitalisme menjadi suatu kekuatan produktif yang digunakan para kapitalis, sebuah instrumen golongan yang menipu kesadaran kolektif.

Muatan ilmu pengetahuan yang membicarakan alam berada dalam prinsip bebas ideologi, sejauh subyeknya memiliki hukum yang otonom dan dapat digambarkan sebagai bebas dari perantaraan manusia. Meskipun demikian, karena pengetahuan tentang alam dan hukum-hukunya yang historis diperoleh melalui praktek, dan karena tujuan-tujuan serta metode ilmu pengetahuan diperantarai oleh aktivitas manusia dan industri, timbullah peluang terjadinya distorsi ideologis, lebih dalam "konsepsi-konsepsi abstrak" para pakar mengenai semua yang berurusan dengan hubungan antara ilmu pengetahuan, masyarakat dan sejarah.

Dalam konteks sosiologis, terdapat perbedaan cukup signifikan antara ilmu pengetahuan dengan ideologi, di mana bahasan ilmu pengetahuan perlu mendeskripsikan dan mematerialkan perantaraan manusia sehingga terjadi peningkatan kemungkinan distorsi ideologis. Selagi ilmu pengetahuan sosial dalam membicarakan obyeknya memperhitungkan sifat sejarah, dan sejauh itu mampu menembus penampakan obyektif dan menemukan hubungan-hubungan yang sesungguhnya, maka ilmu pengetahuan dapat bebas dari ideologi. Soal yang berbeda terjadi ketika ditemui eksistensi ideologi yang berbentuk ilmu pengetahuan, padahal sesungguhnya bukan. Seperti ditunjukkan Marx, ideologi dapat berindung di balik pengetahuan untuk menutupi distorsinya, bentuk kerja yang merupakan ciri khas Kapitalisme. Jadi, walaupun ilmu pengetahuan sosial berbeda dari ideologi, ideologi dapat memilih lapangan ilmu pengetahuan sosial untuk mengabsahkan diri.

Akhirnya bagi Marx, antara ilmu pengetahuan dan ideologi berada dalam serangkaian hubungan yang rumit. Ilmu pengetahuan bukan oponent total yang dapat mengatasi ideologi. Dengan kritik intelektual saja, ilmu pengetahuan tidak berkonfrontasi dengan ideologi seperti kebenaran berlawanan dengan kesalahan.

Bahkan, ilmu pengetahuan dapat menyumbang pada pengertiannya. Ilmu pengetahuan sendiri bukanlah wilayah yang eksklusif dari penetrasi ideologi, di mana pemahaman dirinya terhadap fenomena supra-historis yang tidak akomodatif terhadap kontradiksi sosial merupakan kesalahan yang dapat memainkan peranan ideologis. Walaupun begitu, tidak semua kesalahan ilmiah adalah ideologis. Kesalahan yang menyembunyikan kontradiksi sosial untuk kepentingan dominasi dapat dianggap sebagai kesalahan ideologis, dan pertalian ini, harus dimengerti secara sejarah menurut jalannya kontradiksi.

Masih ada cara kedua untuk memahami ilmu pengetahuan sebagai ideologi yang berasal dari tradisi Historisisme Jerman yang dikembangkan oleh aliran *hermeneutic* yang anti-positivis. Dengan konsep ideologi yang negatif, dikatakan bahwa rasionalitas ilmiah mungkin ideologis tidak hanya dalam pengertian yang berhubungan dengan golongan, tetapi karena menjadi sumber dan pembenaran dominasi dalam masyarakat (Larrain, 1996, hal. 235). Pada yang pertama ideologi mungkin ilmiah atau mungkin diputar balik, sementara yang kedua menyatakan bahwa ilmu pengetahuan muncul sebagai sumber distorsi. Posisi pertama melemahkan konsep ideologi sedangkan yang kedua berpengaruh mendalam terhadap konsep ilmu pengetahuan.

George Lukacs memulai dengan pendapatnya dalam *History and Class Consciousness* dengan tidak banyak mempertimbangkan efek-efek ilmu pengetahuan yang membebaskan, bahkan sebaliknya, beberapa dari pernyataan yang digunakan memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari pandangan dunia borjuis (Larrain, 1996, hal. 235-236). Dengan cara ini, Lukacs dapat menggambarkan metodologi ilmu pengetahuan alam sebagai metodologis dan ideologis sejauh sebagai

ilmu pengetahuan yang *fethisistic* dari tiap jenis revisionisme. Metodologi tersebut pantas memperoleh predikat demikian karena menolak ide kontradiksi dan antagonisme dalam materi pembicارannya.

Bagi Lukacs, tiap golongan yang memiliki kematangan hegemoni akan mengembangkan pandangan dunia yang terkait dengan percobaan untuk mencapai kontrol masyarakat. Pandangan dunia ini meliputi teori ekonomi, politik dan masyarakat. Pendeknya, suatu pandangan luas yang mencakup ilmu pengetahuan dan metodenya sebagaimana dikemukakan berikut ini (Larrain, 1996, hal. 236) :

Bilamana idealitas ilmu pengetahuan ilmiah diterapkan pada ilmu pengetahuan alam, ia hanya memajukan ilmu pengetahuan. Tetapi jika diterapkan pada masyarakat, ternyata menjadi senjata ideologis bagi kaum borjuis.

Singkatnya, dalam gagasan Lukacs inilah embrio dari konsepsi ilmu pengetahuan sebagai ideologi muncul.

Pemikiran aliran Frankfurt melaju sepanjang garis ini sembari memberi kritik yang lebih luas mengenai jenis alasan beroperasinya ilmu pengetahuan. Horkheimer menggambarkan bagaimana akal disubjektifkan dalam percobaan menguasai alam demi kepentingan manusia (Sindhunata, 1986, hal. 97-101)<sup>11</sup>. Dengan ilmu pengetahuan, akal budi menjadi akal instrumental, berkenaan dengan manipulasi sarana dan tidak lagi memerlukan introspeksi kritis apakah tujuannya itu masuk akal (*reasonable*) atau tidak (Sindhunata, 1986, hal. 99-101). Memang benar bahwa akal instrumental yang ilmiah mengganti kepercayaan mitos dalam sistem hierarkis manusiawi yang primordial, yaitu agama dan metafisika, namun pengaruhnya

---

<sup>11</sup>Horkheimer membedakan akal obyektif, yang biasanya menjadi basis sistem filsafat dan menguatkan akal sebagai realita dalam dunia obyektif, dari akal subyektif yang terdapat dalam dan untuk kepentingan pragmatis manusia. Lihat Max Horkheimer, *Edips of Reason*, Oxford Univ Press, New York dalam Sindhunata, 1986, *op.cit.*, hal.97-191.

mengemaskulasi secara progresif kelayakan tujuannya sendiri. *Self-interest* menjadi dominan. Akal budi tidak lagi *autonomous*, tetapi menjadi alat yang diukur hanya menurut peranannya untuk kemanfaatan pragmatis manusia. Akal instrumental menghancurkan basis mitologi teoretis ilmu pengetahuan menjadi satu otoritas dalam masyarakat, namun tidak dapat memutuskan yang baik dan yang buruk. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh akal obyektif, oleh agama otoriter atau oleh mitologi-mitologi kuno, diambil alih oleh mekanisme-mekanisme reifikasi dari aparatus ekonomi yang anonim.

Walaupun begitu, Horkheimer masih percaya bahwa ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah sarana produksi pembantu yang nilai positif dan negatifnya bergantung peranannya dalam ekonomi (Larrain, 1996, hal.238). Tetapi pada lapangan ekonomi inilah tempat terjadinya manipulasi serta reifikasi. Dominasi alam akhirnya meliputi pula dominasi pada manusia, sehingga terinternalisasi dalam akal subyektifnya. Industrialisme menyebabkan manusia hidup tunduk pada rasionalisasi dan perencanaan. Individu harus beradaptasi dengan sistem tersebut jika mereka ingin tetap eksis.

Demikian proses penyadaran dunia harus terjerumus pada alienasi baru; reifikasi dunia industri. Tetapi reifikasi ini tidak lagi diterapkan sehubungan dengan pandangan dunia borjuis seperti pada Marx dan Lukacs. Dalam Horkheimer dan Adorno, irrasionalitas menjadi hal pokok yang tidak berhubungan dengan pikiran golongan tertentu. Akibatnya, ilmu pengetahuan adalah ideologis tidak saja sebagai ilmu pengetahuan borjuis, tetapi sebagai ilmu pengetahuan itu sendiri. Masalahnya tidak lagi berupa pembentukan hubungan antara manusia dan alam dalam perspektif golongan, tetapi lebih berupa mentalitas manusia terhadap alam yang menjelmakan

tuhan dalam dirinya berkaitan dengan upayanya untuk mendominasi alam. Kontradiksi dasar masyarakat tidak berada dalam hubungan sosial tempat manusia menghadapi alam, tetapi dalam kondisi manusia itu sendiri, sebagaimana pernyataan Horkheimer (Larrain, 1996, hal. 239)

...Di satu pihak, kebutuhan sosial untuk mengendalikan alam selalu menentukan struktur dan bentuk pikiran manusia dan dengan begitu memberi primasi akal subyektif. Di lain pihak, masyarakat tidak sepenuhnya menindas ide dari sesuatu yang melebihi subyektivitas kepentingan diri sendiri.

Tradisi *Frankfurt School* dilanjutkan oleh Marcuse yang melihat bahwa tingkatan terakhir dari deklinasi dan degradasi ilmu pengetahuan ini telah terjadi. Mengutip pendapatnya (Larrain, 1996, hal. 239) :

...Konsep akal teknik barangkali ideologis. Tidak hanya aplikasi teknologi, tetapi teknologi itu sendiri adalah dominasi kontrol yang metodik, ilmiah, diperhitungkan dan memperhitungkan.

Marcuse tidak berhenti sampai di sini, ia juga membedakan kenyataan suatu dominasi dari sifatnya yang menindas (Larrain, 1996, hal. 240). Dalam Kapitalisme yang telah maju, dominasi kehilangan sifatnya yang menindas dan menjadi sah karena selalu meningkatkan produksi yang memungkinkan konsumsi secara lebih luas. Dominasi, karena itu tidak muncul sebagai irrasionalitas atau alat politik, tetapi lebih sebagai semacam ketundukan pada aparatus teknik yang memperluas kenikmatan hidup dan meningkatkan produktivitas buruh. Rasionalitas teknologi dengan begitu bahkan lebih melindungi daripada membatalkan keabsahan dominasi.

Teknologi dan ilmu pengetahuan melengkapi Kapitalisme maju dengan segala sesuatu untuk menyembunyikan kontradiksi golongan dan politik. Dominasi tidak lagi memerlukan represi politik, manipulasi kebutuhan saja telah cukup dan

masyarakat industrial dengan sukarela akan mengamininya. Kebebasan memiliki terhadap komoditas dengan berbagai merk baru dan *euphoria* modernitas lainnya diadopsi ke dalam instrumen dominasi. Karena itu, individu-individu dengan rela menyamakan diri dengan atribut yang disematkan untuk mempertahankan eksistensi dalam perkembangan kepuasan mereka sendiri.

Habermas -- generasi terakhir dari aliran Frankfurt -- juga menempatkan dirinya dalam tradisi yang digambarkan Marcuse, tetapi ia berusaha mengubah basis argumen tersebut dengan hasil yang tetap kritis (Hardiman, 1993). Keberatannya yang pokok adalah bahwa para pendahulunya telah mengembangkan polarisasi ide antara korupsi rasionalitas ilmiah dan kesederhanaan politik dari kekuatan produksi tanpa mendamaikan keduanya. Keistimewaan rasionalitas ilmiah terletak pada fungsinya yang ambigu dan muncul secara bersamaan; sebagai kekuatan produksi yang progresif sekaligus sebagai ideologi. Untuk mempertanggungjawabkan sifat ganda ini, Habermas mengusulkan untuk merumuskan kembali konsep rasionalitas Weber di atas basis yang baru, pembedaan antara pekerjaan (tindakan yang rasional-bertujuan) dan interaksi (tindakan komunikatif) (Hardiman, 1993, hal. 73-99). Ia selanjutnya menawarkan sebuah skema interpretif model non-selektif --- dikatakan demikian karena ingin melukiskan seluruh perkembangan yang mungkin untuk realisasi struktur-struktur kesadaran modern --- yang dapat diambil dalam hubungan-hubungan pragmatis formal manusia; yaitu dengan kenyataan obyektif, kenyataan sosial dan kenyataan subyektif. Terhadap tiga fakta tersebut, manusia dapat mengambil tiga sikap, yaitu mengobyektifkan, konformatif-norma (sikap kritis) dan sikap ekspresif (Hardiman, 1993, hal. 93-94). Ketiganya diandaikan oleh Habermas dapat menyingkap tabir-tabir ideologis yang menyelubungi realitas.

Evolusi Kapitalisme dalam abad ke-20, menurut Habermas, telah mendatangkan dua faktor baru; peningkatan intervensi negara di satu pihak serta kebebasan sains dan teknologi di pihak lain (Habermas, 1990). Perubahan Liberalisme menjadi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dalam prakteknya telah menghancurkan ideologi penukaran yang adil. Ideologi dan ilmu pengetahuan menjadi lebur dan semakin manipulatif. Dalam Kapitalisme Liberal, norma-norma interaksi konsensual --- yaitu kebebasan, kesamaan dan seterusnya --- dilihat sebagai operasi kekuatan ideologi yang berasal dari ekonomi pertukaran bebas. Dengan datangnya Kapitalisme industri skala besar, norma-norma konsensual diganti dengan logika kemajuan teknik ilmu pengetahuan dan tindakan-tindakan rasional-bertujuan. Bersama Kapitalisme, dominasi membawa perluasan dalam "sistem tindakan rasional bertujuan" dengan mengorbankan "sistem tindakan komunikatif" atau "interaksi simbolis". Ideologi teknokratis mengaburkan perbedaan antara interaksi simbolis dan tindakan rasional-bertujuan ini, karena itu lebih tidak terhalang dan lebih penetratif daripada ideologi model lama (Larrain, 1996, hal. 243). Ideologi teknokratis lebih kebal kritik karena ia bukan sekedar ideologi, ia menyembunyikan bentuk-bentuk ideologis dengan selubung yang tampak a-ideologis, di mana Marcuse melihat bahwa dominasi telah terserap ke dalam realita dan secara efektif disahkan.

Rasionalitas ilmu pengetahuan akan membebaskan sejauh tidak melanggar rasionalitas pada tingkat institusional, yaitu jika pembatasan sistem interaksi komunikatif dihapus. Model interaksi komunikatif demikian mengandaikan suatu dunia publik tempat dimana dapat terjalin komunikasi kritis antar orang-orang privat yang membentuk "publik" (Hardiman, 1993, hal. 126-135). Diskusi dan repolitisasi umum diperlukan untuk menjembatani interaksi komunikatif dalam dunia publik.

Namun masih ada masalah yang tertinggal, yaitu bagaimana menumbuhkan dunia publik semacam itu, sementara dalam kondisi sosial yang semakin kompleks saat ini, praktek kekuasaan politik masih bersifat elitis dan politik bukannya dirasionalisasikan melainkan baru dilegitimasi. Untuk masa sekarang, Habermas melihat potensi untuk membentuk interaksi komunikatif hanya sedikit dapat diharapkan dari kelompok-kelompok terpelajar kritis.

Sampai pada titik ini dapat dicermati bahwa terdapat tiga garis dasar yang serupa dari pemikiran ini yang selalu dipertahankan. **Pertama**, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi muncul sebagai sumber yang mengesahkan ideologi. **Kedua**, bahwa aktivitas perjuangan golongan diduga telah menjadi laten secara permanen. Dan yang **ketiga**, kaum akademisi radikal adalah satu-satunya kekuatan potensial yang dapat menentang ideologi teknokratik.

Namun demikian, ide-ide para pemikir garis ini sampai begitu jauh ternyata masih belum cukup membumi untuk memperoleh tempat praktisnya. Seperti ditunjukkan Habermas, ilmu pengetahuan baru sebagai alternatif juga memerlukan teknologi baru, dan lewat tindakan interaktif-komunikatif, teknologi dengan basis sekarang dapat ditinggalkan untuk teknologi yang secara kualitatif berbeda. Namun dapat dibayangkan, kekuatan apakah yang dapat menggerakkan masyarakat ke arah basis yang lebih rasional dan secara fundamental berbeda? Jika hubungan produksi dan kekuatan produktif masyarakat terikat secara intrinsikal dengan dominasi, sementara masyarakat menikmati, ada banyak keraguan mengandalkan masyarakat untuk menggerakkan perubahan. Golongan pekerja, yang dalam analisis Marx dianggap sebagai kekuatan untuk menggerakkan revolusi, ternyata tidak lagi

bahwa sistem tersebut tidak dapat ditentang, atau adakah faktor utama lain yang bertanggung jawab atas proses depolitisasi ideologi selain ilmu pengetahuan. Ini tentu berbeda dengan argumen Habermas; bahwa teknologi teknokratik adalah ideologi yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyembunyikan diri. Selagi Habermas menguatkan bahwa basis ideologi adalah kemajuan teknik ilmu pengetahuan, orang dapat membantah bahwa basis teknologi teknokratik sesungguhnya adalah kontradiksi golongan, dan kemunculannya secara keilmuan hanyalah bentuk mekanisme baru ideologi yang menyembunyikan kontradiksi. Memang perlu dilakukan pembedaan antara ilmu pengetahuan dengan ideologi ilmu pengetahuan (Larrain, 1996, hal.246). Yang disebut kedua adalah basis timbulnya depolitisasi. Pencampuradukan keduanya akan membawa gambaran ilmu pengetahuan sebagai kekuatan yang menahan manusia dalam belenggu, sebagaimana kritik Marx, bahwa mereka yang menganggap produk kesadaran sebagai tempat mempertalikan eksistensinya yang bebas nilai sesungguhnya lupa memerangi kontradiksi faktual yang eksis dalam realitas material. Demikian pula, ilmu pengetahuan dijadikan tanggung jawab atas dominasi abstrak yang tidak dapat mencapai kesadaran, kecuali kesadaran dari para akademisi yang tercerahkan, dan dengan begitu wujud dominasi golongan dalam masyarakat disembunyikan. Bahkan ini dapat saja dilihat sebagai wujud dominasi golongan baru, yaitu dari para akademisi yang dianggap "tercerahkan" terhadap masyarakat yang disub-ordinankan sebagai "awam ilmu pengetahuan".

Pendapat Habermas bahwa Kapitalisme yang telah maju sama sekali mengubah basis bagi berdirinya ideologi ditentang oleh Larrain (1996, hal. 246). Memang benar bahwa Kapitalisme telah berkembang semenjak jaman Marx, namun

revolusioner karena mengidentikkan dirinya dengan masyarakat konsumen dan mendapat kepuasan di sana.

Horkheimer dan Adorno menemui jalan buntu ketika menyadari bahwa manusia akan tetap berada pada kondisi dilematis antara progresifitas teknologis dan kondisi statis ideologi ketika usaha-usaha untuk mengatasinya pun memiliki kemungkinan ideologis (Sindhunata, 1986). Sementara Habermas, meskipun tidak seperti Marcuse yang percaya bahwa ideologi teknokratis itu praktis tidak dapat diserang, namun idenya tentang konflik-konflik golongan yang laten dan ketidakmungkinan krisis sistem dalam Kapitalisme yang telah maju menempatkan dirinya terjebak pula pada pemikiran tentang "ideologi rasionalitas teknologi" istilah yang diberikan Mandel (Larrain, 1996, hal. 244)<sup>12</sup>. Cukup aneh bahwa pemikiran ideologis ini dibagi oleh mereka yang berbicara tentang konsep ideologi.

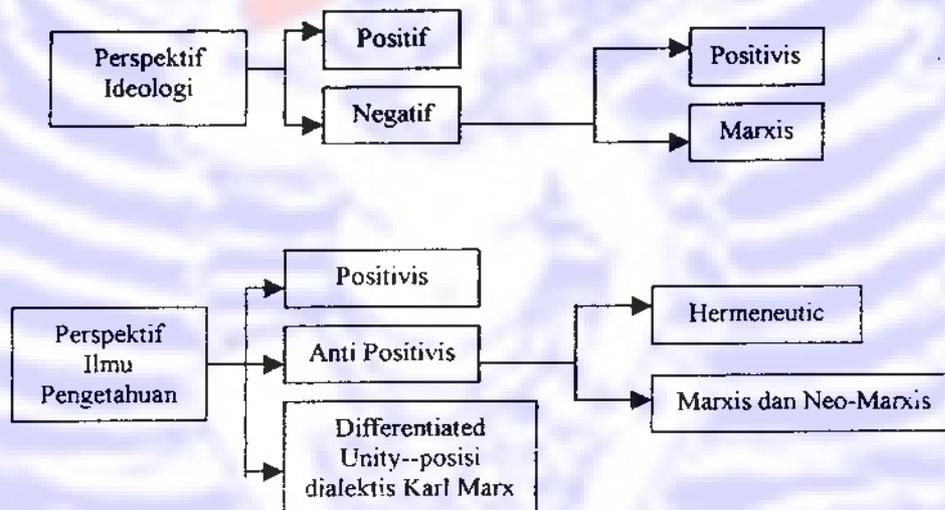
Di luar aliran Frankfurt ini, sesungguhnya masih terdapat pula opini anti-positivistis lain yang sedikit berbeda. Menyikapi berbagai argumen yang dibangun aliran Frankfurt, Jorge Larrain berpendapat bahwa segala argumen yang dipaparkan sesungguhnya hanyalah memperkuat bahwa rasionalitas teknologi sebagai ideologi tidak cukup berhasil, sementara secara samar terus menerima tanpa diskusi bahwa rasionalitas teknologi adalah sumber ideologi baru (1996, hal. 246-247). Dan ini adalah masalah terpenting dari tradisi ini, yaitu tendensi untuk meruntuhkan seluruh sumber ideologi ke dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaan dapat timbul tentang apakah ilmu pengetahuan itu sendiri adalah basis depolitisasi dengan disertai kepercayaan

---

<sup>12</sup> Ideologi menurut Mandel menyatakan orde sosial yang telah ada yang secara perlahan menghapus seluruh kemungkinan krisis, memperoleh penyelesaian teknis pada kontradiksinya, mengintegrasikan golongan-golongan sosial, serta menghindarkan masyarakat dari ledakan politik (Larrain, 1996, hal 244)

ilmu pengetahuan sejauh ilmu pengetahuan tersebut dihasilkan oleh praktek manusia di dalam masyarakat sejarah yang bertentangan, dan ini sangat dekat terkait dengan subyek dari ilmu pengetahuan sosial. Berbagai sudut pandang tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan ideologi yang telah diuraikan tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan dan digambarkan secara ringkas dalam skema berikut :

**Bagan 2.2.**  
**Skema Pemetaan Konsep Hubungan Ideologi dan Ilmu Pengetahuan**



(Disarikan dari Jorge Larrain, 1996, *Konsep Ideologi*, diterjemahkan oleh Ryadi Gunawan, LKPSM, Yogyakarta, hal. 199-205)

## 2.4. TINJAUAN SINGKAT KAPITALISME

### 2.4.1. Hakekat Ideologi Kapital

Salah satu obyek kritisisme penting dari Teori Kritik dalam berbagai formulasinya tidak lain adalah suatu term yang telah dikenal luas namun hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli; yaitu "Kapitalisme". Robert L. Heilbroner pernah melontarkan sebuah pertanyaan menarik dalam salah satu bukunya yang membahas tentang Kapitalisme, pertanyaan yang selalu menimbulkan polemik di antara para ilmuwan sosial ketika harus menorehkan idenya dalam bahasa literer; "Apakah memang sungguh diperlukan terminologi Kapitalisme?" (Heilbroner, 1991, hal. 18). Menurut Heilbroner, perspektif dari suatu hakekat dan logika yang ingin menjelaskan suatu term sosiologis sesungguhnya telah menjelaskan sendiri jawaban dari pertanyaan tersebut (Heilbroner, 1991, hal. 18). Kata-kata deskriptif yang digunakan untuk memisahkan tipe-tipe formasi sosial -- misalnya masyarakat primitif atau upeti -- hanya berguna sejauh kata-kata tersebut menjelaskan aspek-aspek utama dari formasi yang dimaksud hingga mempertegas kemiripan-kemiripan penting di antara masing-masing tipe ideal, selain perbedaan-perbedaannya. Diskusi tentang "masyarakat primitif" tentu saja akan disertai kesadaran sepenuhnya bahwa terdapat beberapa perbedaan prinsipil di antara suku Eskimo, Trobriander, dan Indian Sioux misalnya. Karena terdapat aspek-aspek umum yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi tidak penting, menjalin masyarakat-masyarakat tersebut menjadi suatu kelompok umum komunitas primitif adalah dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Gagasan tentang suatu hakekat atau logika mengharuskan kita menegaskan kemiripan-kemiripan atau perbedaan-perbedaan ini dalam dua aspek yang saling terkait; (1)

menurut lintasan-lintasan yang berbeda dari formasi-formasi sosial besar, (2) dan dalam berbagai hakekat, yaitu dari mana logika-logika ini muncul (Heilbroner, 1991, hal. 18).

Dengan demikian tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa hakekat dan logika masyarakat yang bisa disebut Kapitalis adalah sangat berbeda dengan masyarakat-masyarakat primitif, imperial, atau feodal. Hakekat Kapitalisme, yang bisa dilihat tidak saja dalam lembaga-lembaga bisnisnya, tetapi juga dalam sikap-sikap, perilaku, dan keyakinan umum yang membuat lembaga-lembaga itu berfungsi, tidak bisa dijumpai dalam bentuk-bentuk organisasi yang lebih dini. Demikian pula dengan logika Kapitalisme, tidak pula memiliki padanannya di masa lampau. Suatu formasi sosial yang mencatat sejarah sedemikian tentunya berhak memperoleh suatu label penyebut yang bisa mengarahkan perhatian orang pada sumber dari momentum dan karakternya yang unik.

Heilbroner mengasumsikan bahwa hakekat Kapitalisme sesungguhnya merujuk pada lembaga-lembaga dan relasi-relasi yang merupakan pembentuk perilaku, sementara logika Kapitalisme mengacu terhadap sejumlah pola perubahan konfigurasional yang dibimbing dan dihasilkan dari inti dalamnya (Heilbroner, 1991, hal. 8). Ia memulai penelitiannya dari unsur yang paling penting dalam Kapitalisme, suatu unsur yang tampak dalam logika dunia bisnis namun berasal jauh dari dalam sistem tersebut sebagai suatu aspek primal dari orientasi perilakunya. Heilbroner menyebutnya sebagai dorongan kebutuhan untuk menarik kekayaan dari aktivitas produktif masyarakat dalam bentuk kapital (Heilbroner, 1991, hal. 19).

Ekstraksi kekayaan sebagai suatu arus produksi surplus yang secara sistematis disalurkan dari bagian kerja masyarakat ke suatu kelompok atau kelas

terbatas sama sekali tidak khas Kapitalisme. Catatan sejarah banyak menampilkan proses demikian pada suatu masyarakat yang telah mentas dari komunitas primitif menjadi beradab, misalnya dalam tradisi masyarakat upeti. Terdapat perbedaan signifikan antara karakter produk-produk surplus dari masyarakat ini dengan masyarakat kapitalis. Dalam masyarakat pra-kapitalis, surplus mengambil aspek kekayaan dari benda-benda yang diinginkan karena surplus tersebut mewujudkan atribut-atribut spesifik yang berada dalam karakteristik fisiknya, di mana kekayaan muncul dalam bentuk barang dan jasa yang ditujukan untuk konsumsi kemewahan atau untuk dipamerkan. Karena itu, kekayaan memperoleh sifat-sifat "nilai pakai", sekurang-kurangnya nilai pakai yang mengekspresikan kehebatan dan keagungan penguasaan.

#### **2.4.2. Sejarah Kapitalisme**

Sejarah perkembangan Kapitalisme hingga saat ini masih merupakan masalah yang problematik. Meskipun konsensus tentang titik awal penggunaan istilah Kapitalisme yang digunakan untuk mengacu pada sistem perekonomian di Eropa sekitar abad XVI, yaitu saat runtuhnya feodalisme di Eropa --- namun para sejarawan terkemuka seperti Fernand Braudel-pun yang menulis *Civilization and Capitalism* dalam tiga jilid untuk mengupas Kapitalisme --- tidak mampu memberikan kepastian informasi tentang asal mula dan perkembangan fase-fase Kapitalisme. Informasi yang cukup berharga dikemukakan oleh Dillard tentang asal usul Kapitalisme (Dillard, 1989, hal.15-57).Pernyataan Dillard menyebutkan bahwa meskipun sebagai sistem dunia Kapitalisme baru berkembang sejak abad XVI,namun sesungguhnya Kapitalisme tersebut telah berkembang pada akhir abad Pertengahan. Fase-fase sejarah perkembangan Kapitalisme dijelaskan oleh Dillard sebagai berikut :

Fase pertama, Kapitalisme Awal (1500-1750); adalah Kapitalisme yang berkembang di Inggris selama abad XVI sampai XVIII yang oleh Dillard digambarkan sebagai bertumpu pada industri sandang, dimana pabrik-pabrik pemintalan dan industri tekstil mulai menggunakan mesin-mesin sederhana. Perkembangan pesat industri tersebut selama abad XVI sampai XVIII menunjukkan prestasi spektakuler dengan pendayagunaan surplus ekonomi secara produktif yang membedakannya dari sistem-sistem ekonomi yang telah ada sebelumnya. Berbeda dengan masa feodal ketika surplus digunakan untuk membangun simbol-simbol ekspresi kemewahan yang konsumtif, masa ini bercirikan dengan adanya pemanfaatan surplus untuk usaha-usaha produktif dalam berbagai industri secara ekspansif. Menurut Budiman, kemajuan-kemajuan tersebut tak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai peristiwa yang terjadi di Eropa Barat saat itu terhadap perkembangan pesat Kapitalisme, yaitu : pertama, dukungan agama bagi kerja keras dan asketisme; kedua, pengaruh hasil-hasil tambang dan pertanian Dunia Baru terhadap distribusi relatif pendapatan atas upah, laba dan sewa; ketiga, peranan negara dalam membantu atau secara langsung terlibat dalam aktifitas pembentukan modal (Budiman, 1997, hal.67).

Fase kedua adalah Kapitalisme Klasik (1750-1914); ketika perkembangan Kapitalisme mulai ditandai dengan perubahan dari bentuk perdagangan ke industri. Fase ini merupakan awal maraknya perdagangan berbasis teknologi dalam bentuk industri komoditas massal. Revolusi industri merupakan momentum transisional dari dominasi modal perdagangan menuju modal industri, ketika akumulasi modal yang simultan selama beberapa abad mulai menunjukkan hasilnya pada abad XVIII. Kapitalisme berkembang menjadi motor kemajuan teknologi karena

akumulasi modal memungkinkan dihasilkannya dan dimanfaatkannya penemuan-penemuan baru yang tidak mungkin terwujud dalam masa sebelumnya. Kemudian terjadilah gelombang penerapan praktis ilmu pengetahuan teknis yang telah dibangun selama beberapa abad. Titik ini merupakan awal terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan antara penemu dan pengusaha yang saling membutuhkan untuk memproduksi secara massal komoditas-komoditas baru berteknologi tinggi. Fase ini sarat dengan semangat *laissez-faire* yang diderivasi dari ajaran Adam Smith (Budiman, 1997, hal.67) dan lebih dikenal dengan Kapitalisme Liberal. Berbeda dengan fase sebelumnya, Kapitalisme dalam fase ini berpusat pada di seputar kategori-kategori ekonomis. Sebagai akibat usaha para kapitalis dalam mengangkat kaum borjuis pada posisi vital dalam struktur sosial masyarakat, keberhasilan ekonomis tersebut selanjutnya menghasilkan pula kekuatan politis yang pada gilirannya mampu mendukung suatu peradaban yang semakin menguntungkan perkembangan proses Kapitalisme yang juga dibesarkan oleh konsesi-konsesi yang diperoleh untuk perdagangan bebas.

Fase ketiga, diuraikan oleh Dillard (Budiman, 1997, hal. 68) diidentifikasi sebagai Kapitalisme Lanjut yang berkembang sejak tahun 1914 dengan momentum historis Perang Dunia. Pada fase ini Kapitalisme memasuki tahapan yang tidak dapat lagi dikatakan tradisional, karena sudah tidak lagi selalu ditandai oleh arus besar perdagangan bebas, melainkan terdapatnya peningkatan aturan-aturan pasar yang dikendalikan oleh segelintir entitas ekonomi berskala besar dan campur tangan negara. Pemilikan (*ownership* atau *private property*)-pun telah dilabur menjadi kekuasaan ekonomis korporasi-korporasi multi-nasional. Sistem pekerjaan bebas yang masih mungkin dilakukan dalam Kapitalisme Liberal telah terhapuskan

dan digantikan dengan kerja upahan mekanis dan paksaan. Fase ini juga ditandai oleh bergesrnya hegemoni Kapitalisme dari Eropa ke Amerika Serikat dan bangkitnya perlawanan bangsa Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa. Sementara itu, Revolusi Rusia tampil ke depan menantang keunggulan organisasi ekonomi Kapitalisme sebagai sebuah sistem produksi sekaligus membongkar institusi utama Kapitalisme berupa kepemilikan pribadi atas sarana produksi, meruntuhkan struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan serta agama-agama yang sebelumnya mapan. Bukan sekedar itu, ideologi persaingan bebas yang telah menjadi konsensus pada awal abad XX akhirnya harus mengakui kenyataan telah runtuh pula oleh perang dan sisa-sisanya.

Uraian Dillard tentang sejarah Kapitalisme meskipun demikian masih dianggap oleh beberapa kalangan telah kadaluwarsa karena deskripsinya hanya menyentuh perkembangan Kapitalisme hingga pertengahan abad XX. Padahal, telah terjadi pergeseran bentuk Kapitalisme yang cukup berarti pada beberapa dekade akhir abad XX. Pemikiran tersebut terutama berasal dari Clauss Offe yang melontarkan pemikiran konteroversialnya tentang *disorganized capitalism* (Budiman, 1997, hal.68-69). Menurut Offe, Kapitalisme abad XX telah berkembang begitu rupa hingga semakin jauh keberadaannya dari *organized capitalism* (fase kedua). Menurut Offe, terdapat kondisi disharmoni yang mencolok antara institusi representasi politik dalam sebuah sistem demokrasi dan berbagai persyaratan yang dituntut demi profit kapital dan reproduksi akibat perbedaan kepentingan diantara keduanya. Offe mengidentifikasi bahwa prosedur-prosedur, pola-pola organisasi, dan berbagai mekanisme institusional yang diandaikan mampu menghubungkan dan memelihara suatu harmoni dinamis antara kekuasaan sosial dan otoritas politik -- yakni upaya-

upaya koheren untuk mengorganisir sistem-sistem sosio-politis Kapitalisme *welfare state* kontemporer – secara aktual telah gagal menjalankan fungsinya.

### 2.4.3. Kapitalisme Kontemporer

Organisasi bisnis dan masyarakat industrial modern tidak disangsikan lagi merupakan realitas Kapitalisme yang paling nampak, apapun bentuk Kapitalisme itu. Namun berdasar keterangan Heilbroner, dapat dicermati bahwa terdapat suatu aspek esensial lainnya bagi eksistensi dunia Kapitalisme dari bentuknya yang paling primitif hingga sekarang namun tidak nampak nyata atau konkret (Heilbroner, 1991, 6-8); yaitu semacam dunia bawah (*netherworld*) yang di dalamnya segala aktivitas bisnis terhegemoni. Dunia bawah yang oleh Adam Smith disebut sebagai Tangan Tak Nampak, atau hukum-hukum gerak dari sistem atau "mekanisme pasar" yang pengaruhnya pada dunia bisnis berhasil mendorong pertumbuhan, melibatkannya dalam kontradiksi-kontradiksi internal serta membimbingnya ke arah suatu abstraksi keseimbangan dan kemantapan menyeluruh. Dunia bisnis sendiri merupakan wahana untuk melaksanakan prinsip-prinsip tatanan dan gerakan yang lebih besar dan komprehensif itu. Dari perspektif ini, seluruh skenario sejarah akhirnya bukan sekedar proyeksi tentang akan menjadi apa Kapitalisme itu, tetapi juga tentang konsepsi-konsepsi mengenai apakah Kapitalisme itu; yakni deskripsi atas suatu tatanan sosial yang menampakkan lintasan historisnya karena dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan spesifik dan pelaku-pelaku deterministik. Tepat di titik inilah Heilbroner melakukan penelitian terhadap formasi-formasi sosial Kapitalisme dengan menyebut lintasan-lintasan sistem itu sebagai logika mereka, dan kekuatan atau pelaku-pelaku deterministiknya sebagai hakekatnya (Heilbroner, 1991, 6-8).

Karakteristik mencolok dalam masyarakat kapitalis yaitu penggunaan kekayaan dalam berbagai bentuk konkret, bukan sebagai tujuannya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mengakumulasi lebih banyak kekayaan (Heilbroner, 1991, 20). Dalam Kapitalisme, kekayaan ada dalam benda-benda material secara temporer, sementara yang menjadi inti perkembangan kapital sesungguhnya adalah kekuatan dan kekuasaannya untuk memperoleh kekayaan lebih banyak lagi. Pandangan demikian telah melahirkan suatu cara pandang baru terhadap profil kekayaan; kekuasaannya untuk mempengaruhi lingkungannya dalam rangka memperbesar kekayaan itu sendiri.

Pemikiran tersebut mengantarkan diskursus tentang kapital ke dalam inti dari hubungan sosial dalam Kapitalisme, yaitu **dominasi** (Heilbroner, 1991, hal.23). Dalam hal ini akan nampak perbedaan antara dominasi yang dijalankan oleh para pemilik kapital dengan dominasi oleh para pemilik aspek-aspek wewenang sosial lainnya. Kekuasaan yang dimainkan oleh kapital berbeda dalam cara-cara yang halus namun berarti. Para pemilik kapital tidak berhak memakai kekuatan langsung terhadap mereka yang menolak untuk memasuki hubungan tersebut, baik sebagai pembeli maupun penjual. Dominasi saudagar misalnya, terletak dalam hak legalnya untuk tidak menjual kepada mereka yang tidak mau menerima harga yang dipasangkannya; suatu hak yang dapat mengimplikasikan keterampilan sosial yang besar tetapi bagaimanapun bebas dari paksaan personal secara langsung; saudagar tidak bisa memaksakan seorang konsumen untuk betul-betul membeli (Setiabudi, 1999, hal.96). Demikian pula dominasi suatu imperium kapitalis industrial yang sangat terbatas pada haknya untuk tidak memberi kerja bagi mereka yang tidak mau menerima syarat-syarat darinya.

Namun demikian, kapital hanya dapat menerapkan pengaruh pengatur dan pendisiplinnya bila suatu kondisi sosial menjadikan tindakan menahan menahan kapital itu sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi sosial kritis. Ini jelas melibatkan -- menurut tengara Heilbroner -- pertama-tama kemunculan suatu kelas yang berorientasi kapital dari dalam masyarakat sendiri ke suatu posisi yang berpengaruh (Heilbroner, 1991, hal. 24-25). Hal kedua yang tidak kalah pentingnya, dominasi kapital bertumpu pula pada munculnya suatu kelas pekerja yang kebutuhan hidupnya tergantung pada akses terhadap alat-alat produksi yang secara sah dapat ditolak pemberiannya oleh pemilik modal. Dengan kondisi seperti ini, Marx dengan kritis melihat bahwa ketergantungan demikian menunjukkan adanya penghapusan hubungan-hubungan sosial tradisional yang sebelumnya berlaku, di dalam mana gerakan marginalisasi, penciptaan proletariat dari kumuh-kumuh masyarakat (*the cellars of society*), dan kekuatan-kekuatan pengebu dari arus modernisasi telah merusakkan harmonium sosial dari rezim-rezim sosio-ekonomi tua dan menyediakan lempang jalan bagi rezim kapital sesudahnya.

Heilbroner dalam penjelasannya lebih lanjut mengingatkan bahwa bentuk dominasi yang terjadi juga didasari suatu sifat psikologis keperilakuan; yaitu dorongan tanpa puas untuk terus mengakumulasi kapital (Heilbroner, 1991, hal. 26). Menurut Adam Smith dalam *Theory of Moral Sentiments*, legitimasi terjadinya proses tersebut terletak pada membenaran sosial yang diberikan oleh kekayaan kepada pemiliknya, di mana para pemilik kekayaan merasa bahwa kekayaannya mampu menjadikannya pusat perhatian hingga mereka sangat mencintai hartanya itu melebihi kemanfaatannya (Heilbroner, 1991 hal. 26). Smith tampaknya menunjuk satu unsur universal; keinginan bagi prestise dan kementerian.

Kekayaan berbeda dalam satu segi penting dengan benda-benda prestise atau pemilikan kemenonjolan personal lainnya. Prestise menambah reputasi pemiliknya, tetapi tidak mesti memperbesar kemampuan mereka untuk memaksa orang lain mematuhi perintahnya. Apa yang membedakan keduanya adalah bahwa pemilikan kekayaan memberikan kepada pemiliknya kemampuan untuk mengarahkan dan memobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Dapat dikatakan, kekayaan adalah sejenis hak tertentu yang berkaitan dengan dominasi kapital; yaitu hak untuk menolak memberikan kepada orang lain akses terhadap barang-barang kekayaan. Walau mungkin barang tersebut tidak mempunyai nilai simbolis, tetapi memiliki nilai material sehingga kendali atas akses tersebut memberikan kepada pemiliknya suatu atribut yang melebihi prestise; yaitu kekuasaan.

Singkatnya, kapitalisme adalah rezim kapital; bentuk kekuasaan yang ditemui bila kekuasaan mengambil aspek dominasi oleh mereka yang menguasai akses terhadap sarana produksi kepada mereka yang penghidupan dan kehidupannya tergantung padanya.

Heilbroner memberikan penjelasan yang meyakinkan bagi dorongan mengakumulasi kapital dengan tinjuannya terhadap bentuk-bentuk atribut dari sistem kapital, yang disebutnya sebagai rangsangan tambahan bagi motif perolehan (Heilbroner, 1991, hal. 35-39) yaitu : **pertama**, generalitas bentuk-bentuk kekayaan dibanding dengan nilai pakainya yang spesifik. Hasil generalisasi berbentuk komparasi dan kalkulasi yang tidak mungkin dilakukan dalam masyarakat pra-kapitalis namun saat ini menjadi keharusan di dalam masyarakat kapitalis. Kapital menyederhanakan seluruh bentuk kekayaan, apakah demi prestise atau kekuasaan, menjadi basis moneter. Ketika kekayaan direalisasi dalam benda-benda yang secara

langsung merupakan perwujudan prestise atau kekuasaan seperti pada masa pra-kapitalis, maka tidak ada sarana obyektif yang dapat mengukur jumlah peningkatan unsur-unsur personal atau sosial yang diwakili oleh suatu kekayaan tertentu. Di bawah rezim kapital, muncul perhitungan ketat besarnya kapital uang dengan ukuran-ukuran moneterinya. Rangsangan tambahan yang diberikan kepada dorongan untuk memperoleh kekayaan akibat generalisasinya sebagai kapital tidak menggantikan makna-makna yang tersembunyi --- yaitu kemenonjolan dan dominasi sosial --- malah semakin menajamkan dan mengintensifkan energinya yang terus digunakan bagi perlindungan diri dan akumulasinya. Pertahanan bagi seorang kapitalis, besar atau kecil, adalah suatu konsentrasi terus menerus guna merebut kembali kapital sebagai uang dari tangan masyarakat. **Kedua**, atribut yang juga mendorong usaha akumulasi terus menerus timbul karena eksistensi kapital selalu berada dalam suatu kondisi keterancaman simultan selagi kapital menjalani siklus M-C-M (money-capital-money) yang tidak pernah pustus. Kondisi tersebut diakibatkan oleh perubahan terus menerus komoditas menjadi uang dan sebaliknya, uang menjadi barang; suatu siklus hidup yang harus selalu dipertahankan oleh para pemilik kapital sekaligus proses transformasi seluruh perwujudan kekayaan menjadi cadangan umum yang berpotensi dinikmati pesaing. Inilah justru mengapa lingkaran kapital selalu menjadi beban bagi pemiliknya. Masing-masing kapitalis terpaksa membagikan uangnya ke tangan masyarakat supaya bisa memperoleh jasa buruh dan bahan-bahan untuk mengubah kapitalnya menjadi komoditas. Sementara itu, masing-masing kapitalis harus memperoleh kembali dari masyarakat kapital uang yang telah dikeluarkannya dan secara bersamaan mencoba memperoleh bagi dirinya sendiri kapital uang dari para kapitalis lain yang juga telah dialihkan ke masyarakat. **Ketiga**,

pencairan dan penarikan terus menerus meniscayakan proses kompetisi yang sekarang bisa dipandang suatu unsur dalam kerja sistem yang secara langsung berasal dari sifat kapital itu sendiri. Istilah kompetisi tidak sekedar berarti persaingan para penjual di pasar, tetapi juga merupakan upaya keras dari masing-masing kapitalis guna memperoleh sebanyak mungkin daya beli masyarakat.

Rezim kapital berupaya memapankan suatu sumber surplus abadi yang harus dikumpulkan oleh gerakan M-C-M yang tidak pernah berhenti. Marshal Berman yang dikutip oleh Heilbroner telah menggambarkan dengan jelas bayangan suatu dunia yang di dalamnya mesin bergerak tanpa henti berjalan tanpa hambatan :

Jika kita melihat ke balik kejadian-kejadian sehari-hari yang diciptakan oleh kaum borjuasi kita, dan melihat cara bagaimana mereka sesungguhnya bekerja dan bertindak, kita lihat bahwa warga-warga terhormat ini bersedia merusak dunia jika tindakan itu bisa memberikan keuntungan. Bahkan selagi mereka menakut-nakuti orang dengan cerita-cerita tentang kerakusan dan balas dendam kaum proletariat, mereka sendiri, dengan usaha dagang dan pembangunan mereka yang terus-menerus, melemparkan tumpukan manusia, material dan uang ke segala penjuru dunia, dan selagi mereka melakukan hal itu, mereka merusak atau menghancurkan dasar-dasar kehidupan manusia. Rahasia mereka --- suatu rahasia yang mereka simpa rapat-rapat adalah bahwa di balik penampakan-penampakan luar mereka, mereka adalah kelas penguasa yang paling destruktif dalam sejarah. (1991,93)

Dengan demikian, aspek ideologis Kapitalisme bukan hanya kesan yang ditinggalkan oleh pranata-pranata kapital pada produksi-produksinya, melainkan sejajar dengan kepicikan visi ekonomis dan konsepsi politis dari para kapitalis, maka yang patut diperhatikan tentang wawasan kulturalnya adalah penciptaan wilayah budayanya sendiri (Heilbroner, 1991, hal. 96). Nampak bahwa bagian inheren dari sifat Kapitalisme bahwa lingkaran kapital tidak memiliki dimensi moral intrinsik, tidak ada visi mengenai seni atau ide selain dari bentuk komoditas yang

melingkupinya (Setiabudi, 1999, hal 102). Atas dasar ini, ide-ide tumbuh subur namun moral merosot dan rezim kapita! menjadi ajang bagi berbagai bentuk eksploitasi.

Kapitalisme yang membudaya telah menjelma menjadi sebuah sistem dunia yang bukan saja ditopang oleh institusi formal, tetapi juga oleh pola-pola perilaku acak sebagai produk artifisial kebudayaan modern sebagaimana digambarkan oleh Offe yang menyebut era ini sebagai fase *Disorganized Capitalism* (Budiman, 1997, hal. 68-69). Perusahaan-perusahaan besar menciptakan trend-trend yang menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Dunia hiburan, institusi pendidikan bahkan agama mengalami komodifikasi sedemikian rupa hingga menciptakan pola lintasan yang rigid namun tak beraturan yang diinspirasi oleh semangat kapitalistik. Kehidupan individual telah diformat sejak lahirnya sesuai lintasan fungsional yang diperlukan untuk mengisi sekrup-sekrup kehidupan masyarakat industrial yang mekanis dan seragam. Pola-pola dasar ini, bergerak mengatasmakan berbagai simbol gagasan kekinian --- seperti era perdagangan bebas, globalisasi dan seterusnya --- yang intinya tetap merupakan kredo dasar Kapitalisme kuno (Setiabudi, 1999, hal. 103). Sebagai budaya yang mendunia, Kapitalisme akhirnya memang menjadi tema tunggal yang diadopsi di bawah sadar dan diterima sebagai keharusan wajar gaya hidup masyarakat global.

## **2.5. TINJAUAN SINGKAT MARXISME**

### **2.5.1. Materialisme**

Sumber gagasan besar gelombang anti-positivis dalam berbagai bentuknya dapat dikatakan berhutang besar kepada peletak dasar Sosialisme modern; Karl

Marx. Ide-ide besarnya merupakan dasar bagi penerusnya dalam meneruskan tradisi Kritisisme terhadap gelombang besar Modernitas, Kapitalisme dan Liberalisme. Dalam konteks penyusunan tesis ini, pemahaman yang memadai terhadap pemikiran-pemikirannya merupakan syarat perlu bagi analisis interpretif yang mendasarkan diri pada Teori Kritik.

Pemikiran Karl Marx dalam menerangkan realitas berangkat dari tesisnya tentang materialisme yang kritis terhadap fenomena yang berlaku di jamannya sekaligus berciri sangat sekuler (Sargent, 1987, hal. 80). Marx mengkritik basis filsafat sebelumnya yang dianggapnya merupakan pemikiran idealis. Baginya, para filsuf hanya sibuk menafsirkan dunia dengan cara pandangannya, sementara yang penting sesungguhnya adalah bagaimana mengadakan perubahan. Secara bersamaan doktrin ini meruntuhkan pula supremasi agama yang dianggapnya sebagai candu masyarakat dan hanya berfungsi melegitimasi dominasi yang terjadi hingga menghalangi progresifitas revolusi. Singkatnya, doktrin materialisme mengajarkan bahwa pandangan teoretis umum haruslah selalu terkait dengan dunia material, dan demikian juga sebaliknya. Walaupun beberapa problem berangkat dari dunia ide atau teori yang abstrak, namun pernyataan tersebut haruslah tidak terpisahkan dari praktek. Tidak ada dikotomi antara teori dan praktek hingga Marx sangat menekankan bahasa kerja untuk mendukung pemikiran revolusionernya.

Dasar filsafat Marx dijumpai dalam pengaruh kondisi kehidupan terhadap manusia. Walaupun Marx tidak mengembangkan dasar faham ini dengan seksama --- karena ia mencibir filsafat --- namun baginya, faham tersebut berfungsi sebagai benang merah analisisnya. Pandangan pokok Mrx tentang realitas secara lengkap menyatakan sebagai berikut (Sargent, 1987, hal.80) :

Dalam memproduksi sarana eksistensi sosialnya, manusia memasuki hubungan-hubungan yang pasti dan perlu yang tidak tergantung dari kemauannya; yaitu hubungan-hubungan produksi yang berkaitan dengan suatu keadaan perkembangan kekuatan produksi material. Keseluruhan hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, dasar nyata bagi superstruktur yuridis dan politis dan berhubungan dengan bentuk-bentuk kesadaran sosial. Metode produksi sarana-sarana eksistensi material mengkondisikan seluruh proses kehidupan sosial, politis dan intelektual. Bukannya kesadaran manusia yang menentukan eksistensinya, namun sebaliknya, kondisi sosiallah yang menentukan kesadaran manusia. Pada suatu tahap perkembangan tertentu kekuatan-kekuatan produksi material masyarakat menjadi bertentangan dengan hubungan-hubungan produksi yang ada. Dari bentuk-bentuk perkembangan kekuatan produksi, hubungan ini ditransformasikan menjadi belenggu mereka. Kemudian terbukalah sebuah gema revolusi sosial. Dengan perubahan dalam fondasi ekonomi maka keseluruhan super struktur yang besar itu ditransformasi secara kurang lebih cepat.<sup>1</sup>

Hubungan-hubungan ekonomi bagi Marx merupakan faktor terpenting yang menentukan bentuk-bentuk sosial yang dihasilkan pada suatu waktu dan tempat di dalam mana mereka berinteraksi dengan beberapa aspek superstruktur dan ini akan membuka potensi perubahan dalam hubungan-hubungan ekonomi yang kemudian akan menghasilkan perubahan lebih jauh dalam superstruktur, dan demikian seterusnya (Sargent, 1987, hal. 81). Dengan rumusan sederhana, Marx mengatakan bahwa terdapat relasi kausalitas diantara struktur ekonomi masyarakat dengan superstruktur, namun relasi tersebut tidak sederhana, melainkan lebih cenderung bersifat interaksi-interaksi. Terdapat suatu interaksi kontinyu diantara struktur ekonomi dengan superstruktur di mana perubahan di satu pihak akan menyebabkan perubahan di pihak lain. Dengan demikian struktur ekonomilah yang memiliki peran deterministik hingga superior terhadap seluruh struktur kehidupan, yang oleh Marx diistilahkan sebagai superstruktur. Relasi-relasi ekonomi merupakan faktor penting

---

<sup>1</sup> Superstruktur merupakan istilah Karl Marx untuk menunjuk pada serangkaian bidang-bidang kehidupan sosial yang berpengaruh bagi masyarakat, misalnya : ekonomi, budaya, politik dan

yang menentukan bentuk-bentuk sosial yang dihasilkan pada suatu waktu dan tempat namun mereka berinteraksi dengan beberapa aspek superstruktur yang lain, dan ini akan membuka potensi transformasi yang lebih jauh dalam superstruktur.

Untuk menjelaskan perkembangan materi Marx menerapkan konsep dialektika (Sargent, 1987, hal. 81-82). Marx mengambil konsep tersebut dari W. Frederick Hegel (1770-1831) sekaligus menyerangnya dengan menganggapnya terlalu idealis, karena apa yang berjalan dalam lintasan dialektika menurut Hegel adalah eksistensi jiwa yang Mutlak yang secara bertahap menunjukkan diri sebagai tahapan yang lebih tinggi dari kemerdekaan manusia. Marx mengadopsi konsep ini dengan mengedepankan dialektika materi -- dan bukan ide -- yang berjalan dalam spektrum sejarah. Marx membebaskan dialektika Hegel dari tendensi metafisis. Dengan menekankan pada materi, Marx dapat mengatakan bahwa pandangannya adalah ilmiah karena materi tunduk pada analisis dan hukum ilmiah yang obyektif.

Selanjutnya Marx menerapkan konsep dialektika materi terhadap pandangannya tentang realitas sejarah (Sargent, 1987, hal. 84). Karena setiap perubahan dalam struktur ekonomi terefleksikan dalam transformasi seluruh superstruktur, maka menurut Marx penafsiran seluruh sejarah dapat dilakukan dari perspektif ini. Walaupun nampak sebagai pandangan yang deterministik, namun sesungguhnya Marx tidak mengatakan bahwa ia dapat meramalkan masa depan. Ia hanya mengatakan bahwa terdapat pola-pola tertentu dalam sejarah yang pada semua kemungkinan akan berlanjut ke masa depan.

---

seterusnya

### 2.5.2. Ideologi Marxisme

Ajaran Karl Marx yang konsep intinya diderivasi dari doktrin materialisme pada prinsipnya meliputi empat hal : alienasi, kontradiksi, dominasi serta perjuangan kelas. Tulisan awal Marx yang banyak mengadopsi gagasan humanis Feurbach kebanyakan berbicara tentang salah satu istilah kunci ini, yaitu alienasi. Alienasi mengacu pada hubungan dua atau lebih orang atau bagian dari diri seseorang di mana orang tersebut terpisah dari dan menjadi asing pada atau dasingkan dari orang-orang lainnya (Sargent, 1987, hal. 76). Namun bagi Marx, alienasi mengandung pengertian yang lebih spesifik, dimana di dalam Kapitalisme --- karena alasan-alasan yang telah dijelaskan --- individu menjadi terasing dari dirinya, dari lingkungannya serta pekerjaannya. Individu tidak dapat beraktualisasi dengan utuh dan berkembang secara manusiawi dalam masyarakat kapitalis.

Alienasi terkait erat dengan harta kekayaan pribadi dan kekuasaan karena bentuk alienasi yang terpokok adalah alienasi buruh yang tenaganya mengalami komodifikasi dalam proses transaksi kerja upahan. Seorang buruh, menjual tenaga, usaha, keahlian dan waktunya sehingga sebagian besar kehidupannya telah dibeli oleh seseorang yang memiliki penggunaan atas buruh tersebut sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai alienasi diri. Buruh tidak dapat mengembangkan relasi-relasi manusiawi dengan orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Kondisi inilah yang kemudian ingin diubah oleh Marx dengan doktrin revolusionernya.

Marx kemudian membawa gagasan alienasi ke dalam tulisan-tulisan selanjutnya yang lebih sistematis dan mulai meninggalkan kerangka etis. Melalui analisis struktur, Marx menunjukkan bahwa sesungguhnya alienasi merupakan dampak terjadinya disparitas struktur yang mendominasi sebagian besar masyarakat

dalam industri Kapitalisme. Analisis Marx merupakan kritik yang meluas terhadap masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Kritik utama Marx terhadap Kapitalisme terfokus pada eksploitasi mayoritas; yaitu kelas Proletar atau kaum buruh, oleh kelas minoritas; yaitu kaum Borjuis atau kapitalis (Sargent, 1987, hal. 76-77). Kritik Marx tidak semata-mata pada bidang ekonomi, tetapi juga sampai sejauh mana sistem ekonomi yang berlaku membuat kaum proletar tidak mampu memenuhi potensinya sebagai individu (Setiabudi, 1999, hal. 117). Tidak mungkin bagi mereka --- kelas proletariat yang melakukan kerja-kerja aktual --- untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara apapun karena struktur-struktur dominatif telah menghegemoni kehidupan mereka, sementara kelas kapitalis yang pada umumnya tidak melakukan apa-apa dapat memungut keuntungan yang besar dari kekuasaannya atas sarana produksi.

Marx, dalam analisisnya menggambarkan secara sistematis terjadinya proses dominasi tersebut. Marx memperkenalkan beberapa istilah yang merupakan topik utama dalam pembahasannya untuk mendukung analisisnya; yaitu Teori Nilai Kerja, Upah Subsistensi dan Teori Nilai Surplus (Sargent, 1987, hal. 77-78). Marx menggunakan nilai dalam arti biaya nyata yang dikeluarkan dalam pekerjaan. Menurutnya, nilai --- dan bukan harga --- barang yang diproduksi didasarkan pada jumlah waktu untuk memproduksi barang itu. Inilah yang dinamakan nilai kerja. Seseorang harus bekerja selama beberapa waktu untuk menghasilkan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Marx mengasumsikan bahwa para kapitalis hanya membayar upah buruh pada tingkat untuk sekedar dapat bertahan hidup saja; yaitu upah subsistensi. Hal ini terjadi karena beberapa berikut: pertama, terdapat surplus tenaga kerja sehingga majikan dapat menentukan upah sekehendak hatinya. Kedua,

Para kapitalis dengan semangat akumulasi modal tentunya memilih untuk membayar seminim mungkin pengeluaran-pengeluarannya. Ketiga, karena kontradiksi yang selalu terjadi, akan timbul krisis ekonomi yang menyebabkan para kapitalis tidak mungkin dapat membayar lebih.

Keyakinan Marx begitu besar bahwa keuntungan kapitalis sesungguhnya diambil dari jumlah nilai lebih yang diproduksi di atas jumlah yang dibayarkan pada kaum buruh atau yang dikenal sebagai nilai surplus (Sargent, 1987, hal. 77-78). Pada saat para kapitalis menggantikan buruh dengan mesin-mesin, mereka harus mengurangi upah agar dapat mengimbangi tingkat keuntungan karena keuntungan bersumber dari nilai surplus yang diambil dari buruh. Penggantian buruh dengan mesin akan meningkatkan jumlah buruh yang menganggur sehingga tingkat upah dapat ditekan karena tingginya kompetisi. Pengangguran pada gilirannya hanya menghadapkan para buruh pada kondisi tanpa pilihan; menerima tingkat upah yang berada dalam tekanan karena persaingan tajam diantara para pencari kerja atau membiarkan diri terjebak dalam kemiskinan --- atau pemiskinan (Setiabudi, 1999, hal. 118) --- massal yang semakin meluas.

Dominasi pada sisi lain muncul sebagai akibat peran kelas-kelas dominan yang mampu mengarahkan segenap aspek kehidupan untuk orientasi struktur ekonomi yang dieksploitasi demi kepentingan mereka (Sargent, 1987, hal. 17-79). Marx curiga bahwa birokrasi negara dan sekaligus agama adalah termasuk kepanjangan rezim borjuasi dalam melanggengkan dominasi.

Ketegangan yang bersumber dari konflik yang tidak terselesaikan antara golongan pemilik modal dengan kaum proletar dalam pandangan Marx tidak menampakkan satu pun penyelesaian kompromistis yang adil bagi kontradiksi antar

kelas. Bahkan secara ekstrim ia melihat bahwa persoalan tersebut sesungguhnya adalah suatu keniscayaan sejarah, seperti dinyatakannya; bahwa sejarah manusia dari mula hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Kondisi demikian membuat Marx sangat pesimis terhadap kelangsungan hidup Kapitalisme dengan kontradiksi internalnya yang berlangsung terus-menerus. Kontradiksi laten ini membuatnya meramalkan bahwa kehancuran Kapitalisme adalah niscaya untuk kemudian digantikan oleh suatu tatanan masyarakat sosialis, di mana kaum proletar berkuasa dan secara perlahan mengambil-alih seluruh kepemilikan faktor produksi dan mewujudkan impian masyarakat tanpa kelas (Sargent, 1987, hal. 95-96)

Marx menerangkan secara lebih spesifik bahwa struktur ekonomi yang dominan adalah seperangkat hubungan harta kekayaan, di mana terminologi Marx mengacu pada pemilikan sarana-sarana produksi. Relasi harta kekayaan ini ternyata menurut tengarnya berubah lebih lambat daripada metode produksi, akibatnya terjadilah konflik yang hanya dapat diselesaikan melalui perubahan relasi-relasi kekayaan (Sargent, 1987, hal. 85-86). Tendensi perubahan hubungan kekayaan yang lambat cenderung memperlambat pula pemenuhan perubahan kebutuhan akibat perubahan metode produksi. Karena analisisnya mengatakan bahwa hubungan harta kekayaan adalah produk dari metode produksi, maka jelas bahwa relasi-relasi harta kekayaan itulah yang harus diubah guna memenuhi metode produksi baru, bukan sebaliknya.

Keberadaan afinitas hubungan antara metode produksi dengan hubungan-hubungan kekayaan, walaupun demikian tidak dapat dipecahkan sebelum relasi-relasi harta kekayaan yang berubah secara lambat diubah pula (Sargent, 1987, hal. 85-86). Ketegangan inilah yang menimbulkan konflik dalam masyarakat dan

merupakan salah satu alasan utama kontradiksi golongan antara kelas borjuis dengan kelas proletar, di mana Menurut Marx, para pemilik harta kekayaan tidak akan bersedia menyerahkan hartanya meskipun hal itu dipaksakan oleh suatu perubahan dalam metode produksi. Satu-satunya peluang adalah mengatasi kontradiksi tersebut dengan upaya-upaya perbaikan nasib kelas tertindas melalui revolusi (Sargent, 1987, hal. 88). Kesadaran kelas kaum tertindas untuk memperbaiki nasibnya merupakan modal dasar terhadap perjuangan kelas.

Begitu banyak kelemahan Sosialisme Marx sebagai sebuah aliran pemikiran modern, kiranya tak ada yang lebih disayangkan oleh dunia intelektual selain ideologisasi ajaran Marx itu sendiri. Karl Marx, betapapun dihindari dan dikecam, ia tetap seorang pemikir, seorang filsuf Jerman abad ke-19 yang ide-idenya tetap dapat dikoreksi. Dan inilah yang menjadi konsentrasi dari para ilmuwan Neo-Marxis yang bercirikan revisionis dan kritis terhadap doktrin-doktrin Marx untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman. Gagasan-gagasan Marx selanjutnya lebih banyak digunakan sebagai dasar analisis kecenderungan perkembangan masyarakat modern sehingga lebih berfungsi sebagai antitesis ketimbang sebuah ideologi yang kaku. Pandangan Marx yang deterministik ternyata dalam perkembangannya memang tidak pernah berhasil membuktikan kehancuran Kapitalisme seperti yang diramalkannya. Bahkan, rezim-rezim yang selama ini mengklaim dirinya sebagai penganut doktrin Marxisme telah terbukti jatuh bertumbangan.

Teori sosial Marx yang tajam dan memikat banyak orang yang ingin mencari keadilan hingga saat ini tetap banyak digunakan dengan berbagai koreksi dan pengembangan. Istilah-istilah kunci dari Marx banyak dimanfaatkan, namun term-term tersebut telah mengalami modifikasi dan perluasan makna hingga dapat

menangkap perkembangan fenomena kontemporer. Istilah-istilah seperti "alienasi" dan "dominasi" tetap dipakai, namun pemaknaannya dipercanggih menjadi bukan lagi sekedar alienasi dan dominasi struktural - antara kaum buruh dan pemilik modal - tetapi meliputi pula analisa sosio-kultur sebagai premis-premis a priori tentang kontradiksi yang lebih luas; antara yang dominan dan yang didominasi. Hal ini sekaligus menjawab kepicikan banyak tuduhan yang menuduh Sosialisme sebagai ekstrim dan fatalis. Pernyataan Daniel Bell yang menggagas Sosialisme ekonomi dapat dijadikan ilustrasi (Budiman, 1997, hal. 84):

Bagiku Sosialisme bukanlah statisme, atau kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Sosialisme adalah satu putusan atas berbagai prioritas kebijakan ekonomi. Karena itulah saya percaya pada bidang ini, di mana komunitas didahulukan ketimbang individu dalam nilai-nilai yang melegitimasi kebijakan ekonomi. Yang pertama berhak menetapkan semacam "*social minimum*", sehingga memungkinkan individu-individu untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat, untuk menjadi anggota-anggota dari suatu komunitas. Ini berarti serangkaian prioritas yang menjamin pekerjaan bagi mereka yang mencarinya, satu tingkat keamanan yang memadai menghadapi bahaya pasar, serta akses yang cukup atas perawatan kesehatan serta perlindungan dari serangan wabah penyakit dan kesakitan.

## 2.6. TEORI KRITIK

### 2.6.1. Dasar Kepercayaan

Terdapat fakta sejarah yang memang luput dari ramalan Marx, di mana ternyata Kapitalisme tidaklah rigid dan mampu berkembang secara adaptif sedemikian rupa sehingga mampu meredam oposisi terhadapnya (Dillard, 1987, hal. 15-57)<sup>2</sup>. Dalam perkembangannya menjadi *Post-Capitalism*, Kapitalisme bahkan

<sup>2</sup> Dillard menguraikan fase-fase perkembangan Kapitalisme hingga paruh waktu abad XX. Lihat uraian singkatnya pada Dillard, Dudley, 1987, "Kapitalisme", dalam M. Dawam Rahardjo(ed.), *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang*, LP3ES, Jakarta.

telah menjelma menjadi sosok yang sedemikian manusiawi, sebagaimana yang disebut Robert J. Holton sebagai Kapitalisme Kontemporer (Budiman, 1997, hal. 69).

Perkembangan era Modernitas dan Kapitalisme sedemikian, tak pelak, merupakan tantangan yang sangat serius bagi para pelanjut tradisi Marxisme. Berbagai bentuk pemikiran yang membedah Kapitalisme berdasarkan kecurigaan atas bentuk Kapitalisme yang terselubung mencoba meneruskan pemikiran radikal Marx dengan cara berbeda, salah satunya adalah dalam bentuk perspektif Teori Kritis yang merupakan produk dari kalangan Neo-Marxian. Pada dasarnya perspektif ini diturunkan dari pemikiran *Frankfurt school* dengan tradisi Marxisnya --- yang sedikit banyak telah dikupas dalam bagian yang membahas tentang konsep ideologi --- serta mengadopsi pula pemikiran dari aliran *post-structuralist* yang diinspirasi oleh gagasan-gagasan Nitsche dan para pengikutnya yang bersifat post-modernis.<sup>3</sup>

Para peneliti dari perspektif ini memandang bahwa individu-individu bertindak di dalam matriks makna-makna intersubyektif. Dengan demikian seorang ilmuwan dianggap perlu mempelajari bahasa dari subyek / obyek tertentu. Proses pembahasan dimengerti dalam ketergantungan kontekstual dimana seorang ilmuwan sosial perlu terlibat dan melibatkan diri dengan konteks sosio-historisnya. Namun demikian, peneliti aliran Kritis berpendapat bahwa interpretasi *per se* adalah tidak cukup. Interpretasi tidaklah cukup untuk mengapresiasi bahwa realitas tidak saja dimediasi secara simbolis, tetapi juga dibentuk oleh kondisi-kondisi material dan

---

<sup>3</sup> Frankfurt school adalah penerus terbaik tradisi pemikiran Marxisme dengan berbagai revisi-revisi kritisnya terhadap masyarakat industrial yang mengalami dominasi budaya kapitalis-industrial. Tinjauan tentang aliran Frankfurt secara singkat telah diuraikan pada sub-bab yang membahas Konsep Ideologi. Aliran post-structuralist adalah cerminan terbaik dari post-modernism yang disarikan dari pemikiran Nitsche dan dilanjutkan oleh Foucault, Derrida dan seterusnya, yang prinsipnya memandang bahwa tidak ada norma-norma sosial yang layak untuk dipatuhi karena seluruhnya bersifat menguasai. Apa yang ada sesungguhnya adalah kehendak untuk berkuasa.

dominasi (Chua, 1986, hal. 621). Bahasa sendiri mungkin juga merupakan media represi dan kekuatan sosial. Untuk itu, mengikuti Habermas, suatu tindakan sosial hanya dapat dimengerti dalam kerangka yang ditetapkan terkait oleh bahasa, faktor tenaga kerja dan dominasi (Chua, 1986, hal. 621). Dengan kerangka ini, tradisi-tradisi dan skema simbolik dapat menjadi obyek kritik karena relasinya dengan bentuk-bentuk material dominasi yang dibawanya.

Organisasi dipandang sebagai konstruksi tingkat menengah, sebuah mikrokosmik dari kehidupan sosial yang merefleksikan dan mengkonsolidasikan hubungan-hubungan "alienasi" dan "dominasi" (Chua, 1986, hal. 621). Oleh sebab itu, tidak ada pembedaan tegas antara tingkat-tingkat organisasional dan sosial dari suatu analisis. Setiap tingkatnya dipandang memberikan dan diberi kontribusi oleh tingkat yang lain, dimana konflik dalam organisasi akan membentuk dan sekaligus dibentuk oleh golongan-golongan sosial. Kritik ideologi dengan demikian dianggap penting karena konflik fundamental antar kepentingan dan divisi-divisi dipandang eksis dalam kehidupan sosial dan diinstitutionalkan via bentuk-bentuk kultural dan organisasional.

Fokus esensi Teori Kritik ditekankan pada proses pencerahan dan emansipasi, sejalan dengan asumsi bahwa manusia tidak dapat lepas dari bentuk-bentuk dominasi (Aitken dan Graffikin, 1986, hal. 21-22). Berbeda dengan perspektif positivistic, Teori Kritik secara epistemologis tidak bersifat obyektifikasi, tetapi reflektif dengan upaya-upayanya menyingkap bentuk-bentuk dominasi yang tidak disadari dan menjadi ideologis dalam kehidupan sosial (Aitken dan Gaffikin, 1986, hal. 22). Hal ini mensyaratkan suatu proses reinterpretasi radikal terhadap realitas, khususnya

pemahaman pengetahuan, di mana seseorang yang dianggap "terlatih" dan "trampil" secara ilmu pengetahuan justru berpotensi mengalami kegagalan kultural.

### **2.6.2. Keterkaitan antara Teoritis dan Praktis**

Teori dianggap memiliki relasi sebagian dengan dunia praksis. Konsep teori harus dimengerti terkait dengan elan emansipatoris yang mendobrak kesadaran dari kondisi-kondisi restriktif. Hal ini meliputi upaya-upaya penunjukan bahwa apa yang disebut dengan hukum-hukum sosial universal dan obyektif adalah juga produk bentuk-bentuk sebagian dari dominasi dan ideologi. Melalui berbagai analisisnya, peneliti diharapkan dapat menstimulus terjadinya perubahan-perubahan sosial yang mengoreksi ketidakadilan dan diskriminasi. Peneliti Kritik menolak posisi nilai yang secara tradisional didukung oleh pandangan ortodoks --- yaitu seorang ilmuwan dianggap tidak dapat mengevaluasi tujuan dari tindakan --- dengan menyuarakan kritiknya bahwa terdapat penopang yang kokoh pada disbalansi inheren dalam sistem yang berlaku saat ini terhadap hak-hak kepemilikan dan distribusi kapitalistis dari nilai surplus ekonomi. Posisi moral demikian dipandang sebagai sebarang dominasi pula, yang harus ditampakkan dan diubah. Teori sosial dengan demikian memiliki imperasi kritik, sinonim dengan kritik-kritik sosial lainnya.

Standar-standar dan kriteria untuk penilaian suatu penjelasan ilmiah dalam cara pandang filsafat kritik adalah temporer dan kontekstual. Tidak ada fakta bersifat teori-independen yang dapat secara konklusif membuktikan atau tidak membuktikan suatu teori. Melebihi sikap terhadap konsensus yang lemah, para pemikir aliran Kritik lebih tidak sependapat terhadap kriteria pasti yang mungkin dipakai untuk menilai klaim-klaim kebenaran. Lebih jauh lagi, standar interpretif pun --- yaitu derajat konsensus antara peneliti dan pelaku --- masih dianggap belum mencukupi.

Foucault misalnya, ia menolak kriteria transenden untuk menetapkan kebenaran sehingga menulis sebagai berikut (Chua, 1986, hal. 620) : "*Truth is a thing of this world; it is produced only by virtue of multiple forms of constraint. And it induces regular effects of power...*" Seorang ilmuwan tidak dapat mengemansipasikan kebenaran dari setiap sistem kekuasaan. Ia hanya dapat mengupas kekuasaan terhadap kebenaran dari bentuk-bentuk dominasi dimana ia beroperasi pada waktu tertentu.

Berlawanan dengan pendapat tersebut, Habermas melangkah lebih optimis dengan mencoba mencari dan memantapkan suatu proses kuasi-transendental untuk pilihan teori yang rasional, yang secara simultan membukukan pula sifat-sifat keterbatasan historis dari seluruh norma, dan setelah itu mentransendekannya (Chua, 1986, hal. 620). Walaupun demikian, mengingat basis pemikiran perspektif Kritik sendiri yang dekonstruksionis, sampai saat ini masih sangat utopis untuk membayangkan adanya sebarang standar baku berkenaan dengan evolusi teori-teori.

Para peneliti aliran Kritik cenderung untuk tidak menyukai penggunaan model-model matematis dan statistik. Metode kuantitatif dari perolehan data dan analisis digunakan dengan seminimal mungkin. Terdapat penekanan terhadap detail penjelasan historis --- dimana Foucault menekankan pada pendekatan genealogis --- serta studi-studi etnografi yang padat dari struktur dan proses organisasional yang menunjukkan keterkaitan sosialnya (Chua, 1986, hal. 620). Penekanan pada studi historis jangka panjang adalah penting berkenaan dengan kepercayaan awal bahwa identitas suatu obyek atau peristiwa tertentu hanya dapat dicapai melalui analisis terhadap sejarahnya; apa yang telah dan sedang terjadi dan apa yang menunjukkan rigiditas dan hubungan-hubungan a-historis yang membatasi potensialitas

manusiawi. Menurut Aitken dan Graffikin, dengan sifat reflektifnya ini, perspektif Kritis lebih sesuai digunakan untuk analisis organisasional (Aitken dan Gaffikin, 1986, hal. 23).

Ulasan Tinker, Merino dan Neimark (1982), mengantarkan pada simpulan bahwa sesungguhnya diskursus ilmu pengetahuan sosial diliputi secara aktif oleh kontrol sosial dan konflik antar kelas dan masyarakat. Teori ilmu pengetahuan sosial dengan demikian tidak dapat menjadi bebas nilai dan independen dari konflik sosial dan historis. Ilmu pengetahuan sosial niscaya memuat nilai, di mana nilai akan menetapkan serta ditetapkan oleh perjuangan sosial. Dengan mengikuti Marx, perjuangan tersebut dipandang sebagian besar berada dalam kategori-kategori ekonomi. Sebagian konsep nilai ini menjadi dominan karena mereka disuperiorkan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang dominan pula dalam masyarakat selama beberapa waktu.

Usaha tidak kenal lelah dari perspektif kritik berusaha untuk memposisikan ilmu pengetahuan sebagai kritik sosial yang memiliki beberapa karakteristik ; **pertama**, ilmu pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai rasional secara teknis --- yaitu aktivitas yang tidak terpisahkan dari jaringan relasi sosial --- tetapi lebih sebagai diskursus yang membentuk dan dibentuk oleh konflik makro pertentangan kelas (Chua, 1986, hal. 632). **Kedua**, menekankan totalitas seluruh hubungan, baik sosial, politik, ekonomi maupun ideologi (Chua, 1986, hai. 624). Sebagai hasilnya, perspektif ini melahirkan fokus perhatian baru terhadap fenomena makro-struktural.

## 2.7. INTERPRETIF

### 2.7.1. Dasar Kepercayaan

Model Interpretif yang akan digunakan pada tesis ini pada dasarnya diderivasikan dari filsafat Jerman yang menekankan perhatiannya terhadap peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan sosial. Mengutip Schutz dalam Chua (1986, hal. 613), filsafat ini memandang bahwa apa yang secara primordial terwariskan dalam kehidupan sosial adalah sebetuk arus genial yang tak terputus dari pengalaman hidup. Arus kesadaran ini tidak memiliki arti atau identitas diskrit sampai manusia memberikan atensi dan refleksi diri dalam bagian-bagiannya serta memberikan arti padanya. Pengalaman dimana pemaknaan secara retrospektif diberikan disebut perilaku (Chua, 1986, hal. 613). Ilmu pengetahuan sosial pada dasarnya adalah terfokus pada hal ini, pemahaman terhadap bentuk-bentuk spesifik dari perilaku yang bermakna; yaitu tindakan yang berorientasi masa depan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Chua, 1986, hal. 613). Karena tindakan secara intrinsik dimaknai dengan arti yang subyektif oleh pelakunya dan bersifat intensional, suatu tindakan tidak akan dapat dimengerti tanpa referensi terhadap maknanya. Mengutip pendapat Baynes dari C. Edward Arrington dan Jere R. Francis atas persoalan tersebut :

The object of knowlwdge is always already preinterpreted, situated in sceme, part of a text, outside which there are only other text. On the other hand, the subject of knowledge belongs to the very world it wishes to interpret... Thus the idea of the knowing subject disenganged from the body and from the world makes no more sense than the idea of self-transparance : there is no knowledge without a background, and that background can never be wholly objectified (Arrington dan Francis. 1987, hal. 2).

Sejumlah tindakan tidak selalu memiliki arti subyektif. Ketika manusia secara simultan mengerjakan dan mengklasifikasikan pengalamannya terhadap skema interpretif, skema tersebut secara esensial menjadi bersifat sosial dan intersubyektif, dan dengan demikian menjadi obyektif. Seseorang tidak hanya menginterpretasikan tindakannya sendiri, tetapi juga orang lain dimana mereka berinteraksi, dan demikian pula sebaliknya. Melalui proses interaksi sosial yang tidak terputus ini, makna dan norma menjadi kenyataan obyektif (intersubyektif) (Chua, 1986, hal. 613-614). Mereka membentuk realitas sosial yang *given* dan komprehensif yang berkonfrontasi dengan individu secara analog terhadap dunia sosial. Dengan demikian, tanpa menafikan perbaikan dan modifikasi dalam pengetahuan sosial, secara temporer terdapat konstruksi stabil yang diinstitutionalkan, *taken for granted*, dan digunakan untuk menyimbolisasikan atau menstrukturkan pengalama. Simbolisasi ini merupakan bagian terpenting dari kerangka sosial dimana sejumlah tindakan dibuat (Setiabudi, 1999, hal. 70). Dalam hal pandangan terhadap manusia, terdapat dua asumsi penting dari perspektif Interpretif. **Pertama**, tindakan manusia berasal dari tujuannya, dan **kedua**, asumsi tentang dunia yang teratur dan pre-given dari makna-makna yang memberikan struktur terhadap tindakan manusia (Chua, 1986, hal. 615). Mengutip Schutz dalam tulisan Chua (1986, hal. 615), setiap tujuan selalu memiliki elemen masa lalu dimana pengalaman yang ada hanya dapat diartikan dengan cara melihat pada masa lalu pula. Walaupun demikian, tujuan sendiri dibentuk dalam konteks sosial yang berubah dan tidak *pre-given*.

### 2.7.2. Keterkaitan antara Teoritis dan Praktis

Tidak ada prosedur baku tentang bagaimana seorang ilmuwan sosial dapat memperoleh pemahaman interpretif yang baik. Awalnya, terdapat pemikiran yang

# BAB III

### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

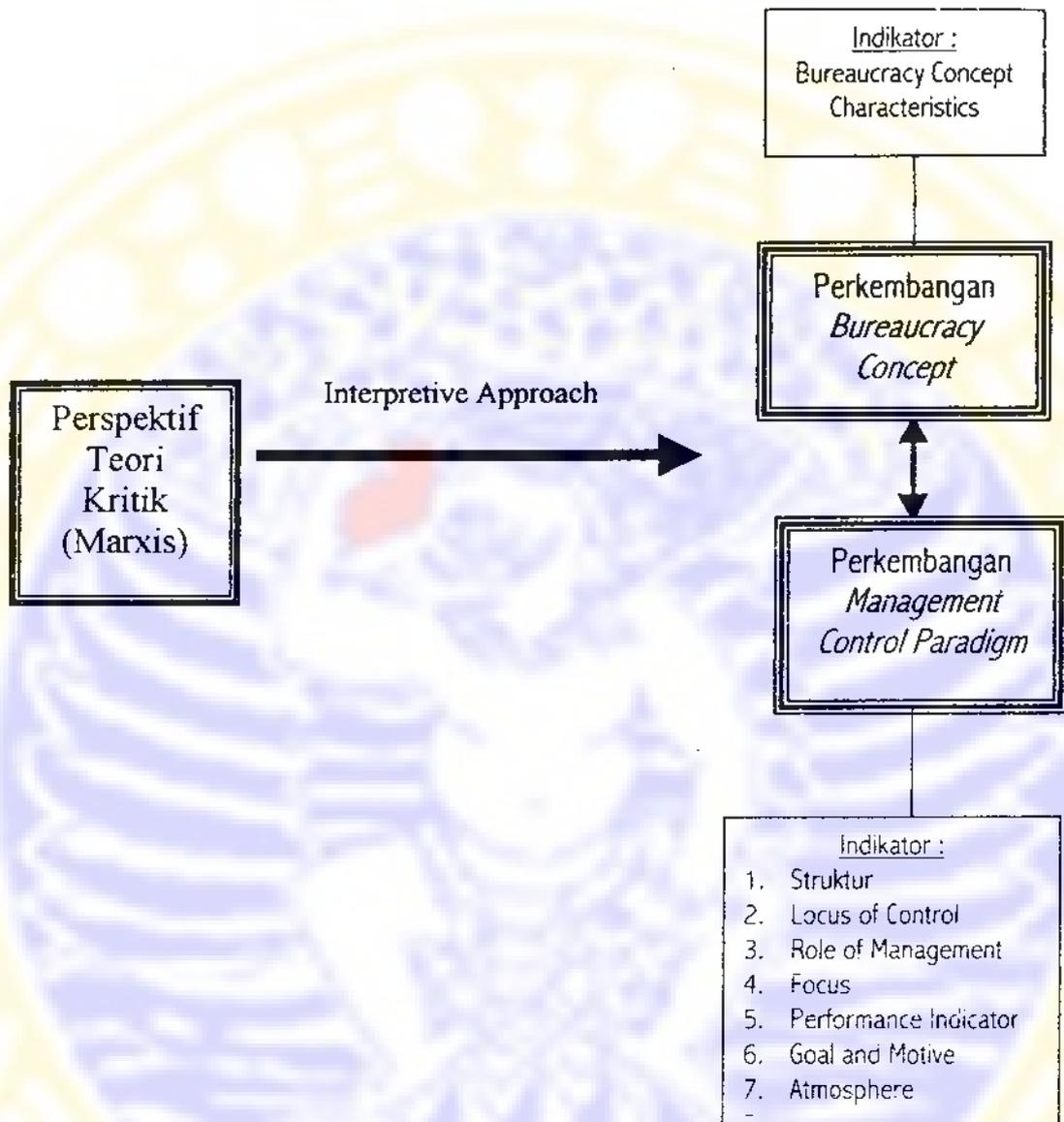
Berkembangnya berbagai bentuk studi tentang *management control* maupun *bureaucracy* dalam konteks manajemen dan organisasi mendasari munculnya *inquiry* untuk mengetahui : "Bagaimana perkembangan paradigma *management control* dan konsep birokrasi dalam perspektif Teori Kritik" dan "Apakah perkembangan *bureaucracy concept* mempengaruhi perkembangan paradigma *management control*". Untuk menjawab keingintahuan tersebut, akan dilakukan kajian terhadap perkembangan paradigma *management control* dan perkembangan *bureaucracy concept* itu sendiri melalui indikator yang merupakan karakteristik dari bentuk tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan *management control paradigm* atau untuk membandingkan *management control* pada masing - masing paradigma adalah : (a) *structure*, (b) *locus of control*, (c) *role of management*, (d) *focus*, (e) *performance indicator*, (f) *goal and motive*, (f) *atmosphere*

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan konsep birokrasi adalah karakteristik birokrasi itu sendiri yang terdiri dari :

- (a) hierarkie organisasi,
- (b) impersonalitas operasi,
- (c) peraturan yang ekstensif,
- (d) kerumitan tugas-tugas administratif,
- (e) kerahasiaan,
- (f) seleksi dan sistem karir karir (*merit system*)

Kerangka berpikir tersebut secara konseptual digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Kerangka Konseptual



**BABIV**

## BAB IV

### METODELOGI PENELITIAN

#### 4.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (1996, hal. 3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku (obyek) yang diamati. Pendekatan ini menurut Willem dan Rausch (1969) yang kemudian diulas lagi oleh Guba (1987 :11-17) tidak mewajibkan peneliti terlebih dahulu membentuk konsepsi-konsepsi atau teori-teori tertentu mengenai lapangan perhatiannya. Peneliti dapat mendekati lapangan perhatiannya dengan pikiran murni dan memperkenalkan intepretasi-intepretasinya muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa dan fenomena yang terjadi (Moleong, 1996 : 3).

Berbeda dengan umumnya metode kualitatif yang biasanya dilandasi oleh kerangka paradigma Naturalistik (Moleong, 1996, hal. 30-34) metode penelitian dalam tesis ini dilandasi oleh paradigma Teori Kritik. Paradigma ini merupakan pengembangan alternatif dari paradigma ilmiah yang mengadopsi pendekatan sosiologi Teori Kritik, yaitu dengan proposisi *a priori* berdasarkan analisis struktural Marxian, yang bertujuan menampilkan realitas secara reflektif dari posisi tersebut (Aitken dan Gaffikin, 1986, hal. 20-26). Jelasnya, metode penelitian ini berangkat dari interpretasi radikal terhadap cara pandang dunia (*worldview*) dengan asumsinya tentang struktur-struktur dominasi yang niscaya terdapat dalam realitas. Tujuan

penelitian dengan demikian bersifat emansipatoris terhadap struktur masyarakat yang mengalami dominasi.

Paradigma Teori Kritik kemudian digunakan sebagai skema interpretif. Skema ini menetapkan struktur pemaknaan tertentu terhadap perilaku-perilaku yang saling berinteraksi membentuk hubungan intersubyektif, yang dengan demikian menjadi subyektif.

Berdasarkan skema ini, riset selanjutnya menggunakan *intepretive approach* dalam analisis dan pembahasan yang dilakukan secara deskriptif-argumentatif. Dalam pendekatan interpretif, ciri utamanya adalah adanya peranan kunci yang diberikan kepada gagasan (*ide*) dalam pikiran orang dan ekspresi simbolisnya dalam kehidupan sosial. Pendekatan intepretatif pada masa sekarang pada hakekatnya bersifat kognitif, yakni terdiri dari gagasan, pikiran dan unsur lain yang termuat dalam kesadaran. Individu mempunyai gagasan dalam pikiran, gagasan tersebut akan digunakan untuk menggolongkan dan membagi kejadian dan situasi. Dengan cara tersebut mereka memberikan *meaning, rationality, coherence* dan *order* pada situasi atau realitas yang menjadi obyek studinya. Pendekatan intepretatif memandang bahwa realitas sosial mirip sebuah teks atau karya seni, yaitu keseluruhan susunan makna yang perlu diintepretasikan sebelum dapat dipahami (Wuismann, 1996 : hal 64-65).

#### 4.1.1. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan yang digunakan dalam tesis ini -- mengutip Gaffikin (1988, hal. 30) -- merujuk pada prosedur penelitian a priori dengan sistematika sebagai berikut :

1. Asumsi a priori
2. Problem Penelitian
3. Deduksi (argumen silogistik)
4. Formulasi hipotesis (konklusi)
5. Observasi (verifikasi)

#### 4.1.2. Tahap-tahap Penelitian

Pada dasarnya, proses penelitian akan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut (Moleong, 1996, hal. 239-240) :

1. Tahap **pertama**, adalah mengetahui sesuatu yang perlu diketahui. Tahap ini disebut orientasi untuk memperoleh gambaran umum tentang fokus penelitian. Tujuannya ialah memperoleh informasi tentang latar yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelacakan dan pemaparan informasi yang dimaksud.
2. Tahap **kedua**, adalah tahap eksplorasi fokus. Dalam tahap ini terdapat penyusunan pedoman akumulasi data, di mana dalam hal ini dilakukan melalui eksplorasi literatur yang dilanjutkan dengan proses pengolahan data. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dalam suatu rangkaian logis. Tahap ini diakhiri dengan proses analisis yang akan dipaparkan secara sistematis dalam laporan analisis.
3. Tahap **ketiga** adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan. Pada tahap ini dilakukan penghalusan data serta perbandingan keabsahan data terhadap berbagai sumber literatur pembanding, sumber-sumber literatur terbaru dan diskusi intensif dengan berbagai pihak yang kompeten.

Teknik pengumpulan data dominan dengan studi eksplorasi literatur dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan akumulasi data berbagai sumber literatur yaitu buku, majalah, artikel, jurnal, buletin, rujukan penelitian terdahulu, hasil seminar, ceramah, diskusi panel dan aktivitas sejenis yang terkait dengan topik penelitian.
2. Mengklasifikasikan data yang didapat dari berbagai sumber literatur tersebut untuk menunjang menyusun latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan teori, metodologi penelitian serta analisis dan pembahasan.

#### 4.1.4. Teknik Analisis

Analisis merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis sejumlah data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja serta untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 1996, hal. 103). Dalam penelitian kualitatif, analisis data bergerak mulai saat proses pengumpulan data hingga penafsiran dan pembahasan terhadap data.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretif yang tersusun atas dasar skema interpretif Teori Kritik. Hal ini dilakukan dengan tujuan : (1) perumusan model hubungan sesuai dengan kerangka berfikir awal, serta (2) untuk mempertajam derajat keterbedaan karena menggunakan proposisi yang *a priori*.

#### 4.1.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dominan dengan studi eksplorasi literatur dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan akumulasi data berbagai sumber literatur yaitu buku, majalah, artikel, jurnal, buletin, rujukan penelitian terdahulu, hasil seminar, ceramah, diskusi panel dan aktivitas sejenis yang terkait dengan topik penelitian.
2. Mengklasifikasikan data yang didapat dari berbagai sumber literatur tersebut untuk menunjang menyusun latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan teori, metodologi penelitian serta analisis dan pembahasan.

#### 4.1.4. Teknik Analisis

Analisis merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis sejumlah data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja serta untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 1996, hal. 103). Dalam penelitian kualitatif, analisis data bergerak mulai saat proses pengumpulan data hingga penafsiran dan pembahasan terhadap data.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretif yang tersusun atas dasar skema interpretif Teori Kritik. Hal ini dilakukan dengan tujuan : (1) perumusan model hubungan sesuai dengan kerangka berfikir awal, serta (2) untuk mempertajam derajat keterbedaan karena menggunakan proposisi yang *a priori*.

#### 4.1.5. Teknik Pembahasan

Teknik penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah teknik deskriptif-argumentatif, yaitu teknik penulisan kualitatif dengan menguraikan, menjabarkan serta merangkai pola, kategori dan satuan uraian dasar yang diteliti secara apa adanya menjadi suatu alur pemahaman logis dengan didasari oleh alasan-alasan logis dan rasional yang mendukung.

#### 4.2. DESKRIPSI INDIKATOR

Deskripsi terhadap indikator untuk mengetahui perkembangan paradigma *management control* dapat diuraikan sebagai berikut :

##### a. *Structure*

*Structure* menunjukkan bagaimana proses perintah, wewenang dan pertanggungjawaban dalam organisasi berjalan.

##### b. *Locus of Control*

*Locus of control* menunjukkan bagaimana pengendalian dan otoritas dalam organisasi dijalankan apakah dengan sentralisasi, desentralisasi, participatory atau dengan melalui konsensus para anggota organisasi.

##### c. *Role of Management*

*Role of management* adalah posisi atau peranan para manajer dalam management control organisasi.

##### d. *Focus*

Implementasi control dalam organisasi dilakukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu. Fokus di sini mengidentifikasi kepentingan / pihak mana yang menjadi prioritas / orientasi utama organisasi.

*e. Performance Indicator*

kesuksesan suatu organisasi.

*f. Goal and Motive*

*Goal dan motive* menunjukkan apa sasaran dan motif atau yang melatarbelakangi perusahaan dalam mengimplementasikan *management control*.

*g. Atmosphere*

*Atmosphere* disini menunjukkan suasana atau iklim apa yang muncul dan mewarnai organisasi dengan adanya *management control*.

Deskripsi karakteristik birokrasi yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui perembangan konsep birokrasi adalah sebagai berikut :

*a. Struktur Organisasi*

Struktur organisasi digunakan sebagai indikator untuk mengetahui bagaimana bentuk dan fungsi hirarki dalam hubungannya dengan pemusatan kekuasaan (perintah dan wewenang) dan pertanggungjawaban.

*b. Unit Kerja*

Indikator ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kegiatan kerja dalam organisasi dilakukan.

*c. Sifat Operasi*

Sifat operasi sebagai indikator digunakan untuk menunjukkan bagaimana kegiatan dalam organisasi dilakukan baik dalam hubungannya dengan anggota organisasi dengan klien.

- e. *Performance Indicator*
- f. *Goal and Motive*
- g. *Atmosphere*

Melalui indikator tersebut akan dilihat bagaimana karakteristik *management control* di bawah paradigma tradisional, adaptif dan *cybernetic* dalam Perspektif Teori Kritik.

Pada tahap selanjutnya dilakukan tinjauan terhadap perkembangan *bureaucracy concept* dengan menggunakan karakteristik birokrasi sebagai indikator (Downs, 1967). Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Struktur Organisasi
- b. Unit Kerja
- c. Sifat Operasi
- d. Pengambilan Keputusan
- e. Intensitas tugas - tugas administratif
- f. Akses terhadap informasi
- g. Perekrutan dan jenjang karir

Melalui indikator tersebut akan dibahas bagaimanakah perkembangan konsep birokrasi tersebut dipandang dari Perspektif Teori Kritik.

Hasil analisa dan kajian terhadap perkembangan *management control paradigm* dan perkembangan *bureaucracy concept* digunakan sebagai dasar pembahasan untuk membuktikan : Apakah perkembangan perkembangan *bureaucracy concept* mempengaruhi perkembangan paradigma manajemen control dalam organisasi.

Pembahasan dilakukan dengan cara deskriptif argumentatif melalui kegiatan interpretasi terhadap gejala - gejala yang muncul dalam perkembangan obyek --- paradigma *management control* dan *konsep birokrasi* --- dan bentuk hubungan antar obyek dalam kerangka Teori Kritik.



**BAB V**